

# LAPORAN AKHIR PENELITIAN STRATEGIS NASIONAL

**TEMA:**  
INTEGRASI BANGSA DAN HARMONI SOSIAL

## JUDUL PENELITIAN

MODEL PENYELESAIAN KONFLIK NELAYAN DI KAWASAN  
SELAT MADURA BERBASIS PADA KEARIFAN LOKAL  
SEBAGAI MODAL SOSIAL

NAMA PENELITI UTAMA DAN ANGGOTA

Prof. Dr. Suryanto, M.Si

Moh. Bagus Gozhali Aniputro, S.Psi. M.Psi



Dibiayai oleh Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,  
sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Penelitian Strategis Nasional  
Nomor : 004/SP2H/PL/Dit.Litabmas/III/2012, tanggal 7 Maret 2012

UNIVERSITAS AIRLANGGA  
NOPEMBER, 2012

**LAPORAN AKHIR  
PENELITIAN STRATEGIS NASIONAL**

**TEMA:  
INTEGRASI BANGSA DAN HARMONI SOSIAL**

**JUDUL PENELITIAN**

**MODEL PENYELESAIAN KONFLIK NELAYAN DI KAWASAN  
SELAT MADURA BERBASIS PADA KEARIFAN LOKAL  
SEBAGAI MODAL SOSIAL**

**NAMA PENELITI UTAMA DAN ANGGOTA**

**Prof. Dr. Suryanto, M.Si**

**Moh. Bagus Gozhali Aniputro, S.Psi. M.Psi**



**Dibiayai oleh Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,  
sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Penelitian Strategis Nasional  
Nomor : 004/SP2H/PL/Dit.Litabmas/III/2012, tanggal 7 Maret 2012**

**UNIVERSITAS AIRLANGGA  
NOPEMBER, 2012**

**HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN**

1. Judul Penelitian : MODEL PENYELESAIAN KONFLIK NELAYAN DI KAWASAN SELAT MADURA BERBASIS PADA KEARIFAN LOKAL SEBAGAI MODAL SOSIAL
2. Tema : Integrasi Bangsa dan Harmoni Sosial
3. Ketua Peneliti
- a) Nama Lengkap : Prof. Dr. Suryanto, M.Si.
  - b) Jenis Kelamin : Laki-laki
  - c) NIP : 196501221992031002
  - d) Jabatan Struktural : -----
  - e) Jabatan fungsional : Guru Besar
  - f) Perguruan Tinggi : Universitas Airlangga
  - g) Fakultas/Jurusan : Psikologi
  - h) Pusat Penelitian : ----
  - i) Alamat : Fakultas Psikologi, Jl Dharmawangsa Dalam Surabaya
  - j) Telpon/Faks : 031-5032770 / 031-5025910
  - k) Alamat Rumah : Perum Pondok Buana Blok F-4 Bluru Kidul Sidoarjo
  - l) Telpon/Faks/E-mail : 031-8953844/ ...../ [suryanto@unair.ac.id](mailto:suryanto@unair.ac.id)

3. Tim Peneliti

No	Nama	Bidang Keahlian	Institusi	Curahan Waktu (Jam/Minggu)
1	M Bagus Gozali AP	Psikologi Sosial	Unair	6 jam / minggu

4. Jangka Waktu Penelitian dan Pendanaan

- a. Jangka Waktu Penelitian : 2 tahun
- b. Jumlah dana yang diterima oleh Dikti tahun ke-1 : Rp 90.000.000,00
- c. Jumlah yang diajukan ke Dikti tahun ke-2 : Rp 100.000.000,00

Mengetahui :  
Wakil Dekan I,

Surabaya, 1 Nopember 2012  
Ketua Peneliti,

Ilham Nur Alvian, S.Psi. M.Psi  
NIP. 197609012003121001

Prof. Dr. Suryanto, M.Si  
NIP. 196501221992031002

Menyetujui :  
Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Unair,

Dr. Djoko Agus Purwanto, Apt., M.Si  
NIP. 195908051987011001

## ABSTRAK

Penelitian ini memiliki tujuan umum (tahun ke-1) untuk membuat model penyelesaian konflik nelayan di kawasan Selat Madura yang berbasis pada kearifan lokal sebagai modal sosial, dan (tahun ke-2) melakukan implemmentasi model penyelesaian konflik nelayan di kawasan Selat Madura yang berbasis kearifan lokal sebagai modal sosial.

Tujuan khusus penelitian di tahun pertama antara lain: (a). mengidentifikasi bentuk dan pola konflik nelayan di kawasan Selat Madura; (b) mengidentifikasi pola penyelesaian konflik antarnelayan yang dilakukan saat ini; (c) mengidentifikasi sumber-sumber kearifan lokal yang dapat dijadikan modal sosial untuk menyelesaikan konflik nelayan di kawasan Selat Madura. Sementara itu, tujuan khusus penelitian di tahun kedua antara lain: (a) menguji model penyelesaian konflik nelayan berbasis kearifan lokal sebagai modal sosial; (b) mengimplementasikan model penyelesaian konflik nelayan di kawasan Selat Madura yang berbasis pada kearifan lokal sebagai modal sosial.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Informan penelitian ini adalah para nelayan, kelompok nelayan, tokoh masyarakat nelayan di wilayah Selat Madura dan para pejabat yang berwenang yang dapat memberikan informasi mengenai kearifan lokal sebagai modal sosial dalam penyelesaian konflik nelayan. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan wawancara mendalam, studi literatur dan *focus group discussion*. Analisis data dilakukan dengan teknik analisis tematik, dan melalui tahapan-tahapan analisis data yang meliputi: *Open Coding* (Kode Pembuka), *Coding* (Kode Analisis), dan *Selective Coding* (Pemilihan Kode) seperti yang disampaikan oleh Strauss & Corbin, 1994)

Hasil dari penelitian ini antara lain: (1) Bentuk konflik nelayan. Berdasarkan pada pelakunya : ada konflik individu dengan individu, individu dengan kelompok nelayan, kelompok nelayan dengan kelompok nelayan, dan individu / kelompok nelayan dengan lembaga. Berdasarkan pada sumber konfliknya, maka ada karena faktor ekonomi, faktor kewilayahan, dan faktor primordial. Berdasarkan kemunculannya, ada konflik manifes dan konflik latent/potensial. (2) Penyebab konflik nelayan, yaitu: a) pelanggaran wilayah tangkap, b. pelanggaran zona tangkapan serta pengrusakan rumpon/jaring nelayan lain. Kesenjangan penggunaan alat tangkap, pengurusan rumpon atau jaring nelayan, kecemburuan sosial, dan adanya nelayan andon menjadi penyebab konflik yang potensial di Selat Madura. (3) Penyelesaian konflik antar nelayan konflik dilakukan melalui dialog yang arif dan melalui proses mediasi. Dalam mediasi ini, peran ketua rukun nelayan, tokoh agama, dan organisasi seperti HNSI sangat penting dalam membantu Pemerintah untuk menyelesaikan konflik antar nelayan. (4) Kearifan lokal untuk menyelesaikan konflik antar nelayan antara lain, yaitu: ada lembaga rukun nelayan dan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia. Peran tokoh dan pimpinan agama juga sangat penting dalam memediasi dan sekaligus menyelesaikan konflik antar nelayan. Di kalangan nelayan juga terdapat nilai musyawarah dan nilai komitmen yang dijunjung tinggi dalam melestarikan serta menjaga lingkungan laut yang bersifat turun-menurun yang diajarkan oleh leluhurnya.

**Kata Kunci :** Konflik Nelayan, Kearifan lokal, dan Modal Sosial

## **PRAKATA**

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT. atas berkat limpahan rahmat-Nya penelitian ini telah terlaksana tepat waktu, walaupun belum sebagaimana penulis harapkan. Penulis menyadari bahwa banyak pihak yang telah membantu selama pelaksanaan penelitian ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Airlangga.
2. Pimpinan Fakultas Psikologi Universitas Airlangga.
3. Ketua Departemen Psikologi Kepribadian dan Sosial Universitas Airlangga.
4. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Propinsi Jawa Timur
5. Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Proipinsi Jawa Timur
6. Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten / Kota di kawasan Selat Madura
7. Para mahasiswa yang sedang bergabung dalam penelitian payung dengan topik ini untuk menyelesaikan skripsi: Rajif JM, Ginanjar Sugiarto, M Thufail, Bunga, Satria Novianto, Adi Bayu Sasmito, Dani Setiawan dan Arizal Tridiatma .
8. Rekan-rekan yang telah membantu pelaksanaan penelitian ini yang belum penulis sebutkan satu persatu.

Kami mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan dari tulisan ini. Akhirnya, semoga karya penelitian ini dapat bermanfaat.

Surabaya, Nopember 2012

Peneliti

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
ABSTRAK .....	iii
PRAKATA .....	v
DAFTAR ISI .....	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Permasalahan .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	7
1.3. Peta Jalan Penelitian .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>10</b>
2.1. Definisi Konflik .....	10
2.2. Macam-Macam Bentuk Konflik .....	12
2.3. Proses Terjadinya Konflik.....	14
2.4. Model Resolusi Konflik .....	17
2.5 Konflik Antarnelayan .....	19
2.6. Penyebab Konflik Nelayan.....	21
2.7.karakteristik Masyarakat Nelayan .....	22
2.8. Kearifan Lokalsebagai Modal Sosial dan Solusi Konflik Nelayan.....	22
<b>BAB III TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN .....</b>	<b>28</b>
3.1. Tujuan Penelitian .....	28
3.2. Urgensi (Keutamaan) Penelitian .....	28
3.2. Manfaat Penelitian .....	31
3.3.1. Manfaat keilmuan .....	31
3.3.2. Manfaat praktis .....	31
<b>BAB IV METODE PENELITIAN .....</b>	<b>32</b>
4.1. Tipe Penelitian .....	32
4.2. Lokasi penelitian .....	32
4.3. Sumber Data Penelitian .....	32
4.4 Teknik pengumpulan Data .....	33
4.5 Analisis dan Interpretasi Data .....	33

<b>BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>34</b>
5.1. Gambaran Umum Selat Madura.....	34
5.2. Jalur / Zonasi Penangkapan Ikan .....	37
5.3. Bentuk dan Pola Konflik Nelayan di Kawasan Selat Madura.....	40
5.4. Sumber Penyebab Konflik Nelayan .....	44
5.5. Pola Penyelesaian Konflik Nelayan .....	49
5.6. Kearifan Lokal sebagai Modal Sosial Penyelesaian Konflik .....	51
 <b>BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	 <b>53</b>
6.1. Kesimpulan .....	53
6.2. Saran .....	54
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>56</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>57</b>



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Jawa Timur memiliki luas wilayah 47.922 km<sup>2</sup> yang merentang dari perbatasan Jawa Tengah di sisi Barat, dan Selat Bali di sisi Timur. Di sisi Utara dibatasi oleh Laut Jawa dan disisi Selatan dibatasi oleh Lautan Indonesia. Wilayah ini memiliki jumlah penduduk mencapai 37.476.757 jiwa pada tahun 2010 (BPS Jatim, 2012).

Kawasan Selat Madura memiliki arti yang penting bagi kehidupan nelayan di 13 kabupaten/kota di Jawa Timur mulai dari pesisir Tuban hingga Banyuwangi, dan mulai dari Bangkalan hingga Sumenep. Terdapat 225.355 jiwa warga yang menggantungkan hidupnya pada keberadaan Selat tersebut (Data BPS Jatim 2010).

Nelayan yang melakukan operasi di wilayah Selat Madura dapat dikelompokkan ke dalam 4 klasifikasi. Para nelayan ini dalam mencari nafkah kehidupannya di Selat Madura, ada yang menjadi nelayan tetap, nelayan musiman, nelayan andon, dan nelayan diperairan umum. Nelayan tetap biasanya hidup dengan mencari ikan dan mengelola kawasan sumber daya perikanan di sekitar pantai. Nelayan tetap ini umumnya ini berasal dari daerah pantai tempatnya mencari nafkah. Nelayan musiman adalah para nelayan ini yang bekerja sebagai nelayan hanya pada musim panen ikan. Umumnya musim panen ikan adalah musim penghujan atau musim ketika bukan bulan

purnama. Nelayan andon adalah nelayan yang biasanya mendatangi daerah lain dan bermukim di daerah lain untuk sementara waktu. Perbedaan nelayan andon ini bisa datang sendiri ke daerah lain, atau didatangkan oleh para pengusaha lokal untuk memanfaatkan kapal dan fasilitas alat tangkap lainnya. Sementara itu nelayan perairan umum adalah nelayan yang mencari penghidupan dari laut lepas. Umumnya nelayan ini menggunakan kapal besar dan memiliki fasilitas alat tangkap yang lebih modern dibandingkan jenis alat tangkap nelayan lainnya.

Luas Selat Madura ini sekitar 65.537 km<sup>2</sup>. Selat ini memiliki kedalaman antara 0-50 m. Selat ini bentuknya seperti corong di bagian Barat terutama yang berada di Pantai Timur Gresik hingga pantai Utara Bangkalan. Sementara itu di sisi Timur memiliki bentuk melebar ketika berhadapan dengan Selat Bali. Sebagai laut dangkal, para nelayan di wilayah ini dapat menggunakan perahu tradisional hingga perahu yang besarnya melebihi 30 GT (*Gross Ton*). Adapun ikan yang sering ditangkap di wilayah ini adalah : ikan layang, kembung, tengiri, belanak, teri. Alat tangkap yang biasa digunakan oleh para nelayan umumnya berupa: *trammel net*, jaring kepiting, bagan, payung jurung, payang alet, payang oras dan *trawl*.

Saat ini, 70 % daerah perikanan di Indonesia telah mengalami *over fishing* (tangkap lebih), yang ditambah dengan penangkapan ikan secara merusak dan *illegal fishing* yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab (Mahluli, Kompas, 8/6/2010). Kondisi *over fishing* tersebut juga dialami oleh Selat Madura. Pernyataan yang sama juga didukung oleh

pernyataan Kusnadi (2003)

Dalam peta sumberdaya perikanan Jawa Timur, perairan Selat Madura dan perairan Madura kepulauan merupakan perairan yang sudah dalam kondisi tangkap lebih (*overfishing*), selain perairan Laut Jawa dan Perairan Selat Bali (Kusnadi, 2003). Lebih lanjut Kusnadi menekankan bahwa Selat Madura merupakan salah satu wilayah di Jawa Timur yang di masa depan menyimpan potensi konflik untuk memanfaatkan dan memperebutkan sumber daya perikanan dan pesisir di kawasan tersebut (Kusnadi, 2006) Kondisi kawasan laut yang tangkap lebih ini (*over fishing*) memberikan dampak pada menurunnya tingkat pendapatan dan kesejahteraan masyarakat nelayan di sekitar Selat Madura. Akibatnya permasalahan sosial seperti kemiskinan, kesenjangan, keterbatasan sumber daya alam, dan pengrusakan ekosistem lingkungan menjadi isu sosial yang sangat strategis disamping munculnya konflik antarnelayan.

Sejumlah studi tentang konflik nelayan telah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Studi yang dilakukan oleh Darmawan O Sutjipto (2012) menyimpulkan bahwa faktor pemicu konflik nelayan di perairan Selat Madura bisa dipisahkan karena penggunaan alat tangkap *Mini-Trawl* (Tongep), pelanggaran terhadap jalur penangkapan ikan, penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan (destruktif), seperti peledak dan potasium; dan perbedaan metode operasi alat tangkap. Konflik karena pelanggaran terhadap jalur penangkapan terjadi pada hampir seluruh daerah, walaupun tidak ada batas fisik yang jelas tentang jalur penangkapan ikan

([http://jurnalfpik.ub.ac.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=266:jurnal17&catid=69:jurnfpik&Itemid=274](http://jurnalfpik.ub.ac.id/index.php?option=com_content&view=article&id=266:jurnal17&catid=69:jurnfpik&Itemid=274))

Studi lain yang dilakukan oleh Hikmah (2008) dengan judul “Analisis Konflik Nelayan Dalam Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Selat Madura Dalam Perspektif Sosiologis-Hukum (Studi Kasus Nelayan Batah Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur)” memberikan simpulan bahwa ada 6 bentuk konflik nelayan khususnya di Kuanyar, yaitu: Kecamatan Kwanyar dengan nelayan-nelayan Kabupaten Sampang dan Kabupaten Pasuruan. Isu utama yang menjadi akar permasalahan konflik adalah berkaitan dengan isu keterbatasan sumberdaya perikanan Selat Madura yang telah *overfishing*. ([http://repository.ipb.ac.id/bitstream/handle/123456789/5618/Hikmah.Zaenatul\\_C2008\\_abstract.pdf?sequence=1](http://repository.ipb.ac.id/bitstream/handle/123456789/5618/Hikmah.Zaenatul_C2008_abstract.pdf?sequence=1).)

Meskipun beberapa studi telah dilakukan, studi ini memiliki perbedaan dengan studi sebelumnya. Pertama, cakupan wilayah penelitiannya lebih luas. Bila pada penelitian sebelumnya, kajian lebih pada wilayah kampung nelayan, desa dan atau kecamatan tertentu, sedangkan pada studi ini, wilayahnya berupa kawasan / wilayah yang luas, yang terdiri dari beberapa kabupaten/kota di Selat Madura. Kedua, kalau kajian sebelumnya lebih pada pola dan penyelesaian konflik, maka pada studi ini mencoba melihat kearifan lokal sebagai upaya untuk menyelesaikan konflik.

Kusnadi (2007) menyatakan bahwa fenomena konflik sosial nelayan di Jawa Timur merupakan fenomena lama yang berlangsung sejak tahun 70-an. Kusnadi (2007) melanjutkan bahwa kasus terbesar konflik nelayan terjadi 30

September 1974 di Muncar Banyuwangi. Pada peristiwa tersebut terjadi gerakan anarkisme massa dalam bentuk pembakaran jaring porsein dan perahu serta perusakan berbagai fasilitas pabrik pengolahan hasil perikanan.

Penyebab konflik nelayan yang terjadi selama ini, menurut Ketua Forum Masyarakat Kelautan dan Perikanan Oki Lukito, Selasa (1/11/2011), diantaranya disebabkan oleh adanya pelanggaran seperti *illegal fishing* atau pencurian ikan di pantai selatan oleh kapal nelayan asing, perebutan wilayah penangkapan ikan, pengrusakan lingkungan akibat penggunaan jaring terlarang, penangkapan ikan menggunakan bom, serta penggunaan potasium. Pelanggaran-pelanggaran tersebut memicu para nelayan untuk bersitegang dengan nelayan lain yang akhirnya berujung konflik.

Kasus konflik nelayan lain juga terjadi di wilayah Bangkalan sejak tahun 1970-an. Penyebab konflik di wilayah ini antara lain karena adanya kecemburuan para nelayan dalam menggunakan alat tangkap modern dan tradisional. Pertikaian akibat kecemburuan ini berlangsung hingga tahun 80-an. Pada tahun 90-an keadaan konflik bergeser tidak hanya antara nelayan tradisional dengan nelayan modern, tetapi juga antar nelayan tradisional itu sendiri (Ramadhansyah, 2008).

Pada tahun 2009 juga terjadi lagi kasus konflik antara nelayan Kwanyar Bangkalan dengan nelayan Desa Ngemplak Pasuruan, dengan pemicu nelayan Desa Ngemplak mendekati daerah wilayah perairan Kwanyar, dan akibatnya nelayan Kwanyar Bangkalan marah dan konflik terjadi (Koran Madura, 5 Pebruari 2009).

Berpangkal dari banyaknya kasus konflik yang timbul, untuk sementara ini dapat disimpulkan bahwa penyebab konflik nelayan adalah karena pelanggaran terhadap aturan seperti yang ditetapkan pemerintah. Masalahnya meskipun ada aturan, nelayan ini ada yang tahu, dan ada juga yang belum memahami adanya aturan tersebut. Hal ini sangat diduga karena laut itu bersifat *open acces*, sehingga siapa saja bisa menggunakan dan memanfaatkan secara optimal untuk kepentingan ekonomi dirinya, sementara itu fakta lain ada aturan yang sebenarnya juga harus ditaati oleh para nelayan.

Menurut Kardani, informasi dan sosialisasi yang utuh dan menyeluruh tersebut harus yang sudah diberikan, karena cukup banyak kasus pelanggaran yang dilakukan nelayan ketika menangkap ikan, konflik antara sesama nelayan dan konflik nelayan dengan aparat. Pihaknya mencatat ada 100 lebih kasus yang terjadi. Bahkan dalam lima bulan terakhir ini saja, terjadi 10 lebih kasus pelanggaran (<http://jatim.tribunnews.com/2012/06/12/nelayan-sering-bentrok-dinas-perikanan-se-jatim-dikumpulkan>).

Dari banyaknya kasus pelanggaran itu, rata-rata tidak ada kesepahaman antara nelayan dengan aparat, sehingga seringkali menemui jalan buntu dan menyebabkan nelayan marah. Akibatnya, seperti terjadinya kasus perusakan Kantor Polair Jatirejo di Lekok oleh nelayan. Massa mengamuk untuk membebaskan dua nelayan yang ditahan karena menggunakan mini trawl (pukat harimau) yang dilarang oleh Undang-Undang ([http://jatim.tribunnews.com/2012/06/12/nelayan-sering-bentrok-dinas-perikanan-se-jatim dikumpulkan](http://jatim.tribunnews.com/2012/06/12/nelayan-sering-bentrok-dinas-perikanan-se-jatim-dikumpulkan)).

Idealnya isu-isu sosial dengan konflik antar nelayan sebagai akibat dari perebutan wilayah tangkapan dan teknologi tidak boleh terjadi. Pemerintah sudah mengatur dalam aturan perundangan. Masyarakat nelayan sudah memiliki paguyuban kelompok nelayan, dan forum komunikasi juga sering dilakukan oleh dinas yang menangani. Apabila kondisi ini tetap berlangsung, maka akibatnya dapat mengganggu stabilitas nasional dan pembangunan. Oleh karena itu perlu dicarikan langkah pemecahan secara terintegrasi dengan mengedepankan unsur kearifan lokal yang dijadikan modal sosial untuk penyelesaian konflik nelayan tersebut. Secara umum, studi ini ingin mengidentifikasi bentuk konflik dan penyelesaiannya berdasarkan pada kearifan lokal sebagai modal sosial.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang studi di atas, maka studi ini memiliki rumusan masalah umum yaitu bagaimanakah bentuk konflik dan penyelesaiannya dengan menggunakan kearifan lokal?

Bila dirinci, permasalahan yang ingin dijawab dalam studi ini yaitu:

1. **Bagaimanakah bentuk-bentuk konflik nelayan yang terjadi di Selat Madura?**
2. **Bagaimanakah pola konflik nelayan yang terjadi di Selat Madura?**
3. **Bagaimanakah penyelesaian konflik nelayan yang terjadi di Selat Madura?**
4. **Apakah ada nilai-nilai kearifan lokal yang digunakan untuk menyelesaikan**

**konflik nelayan?**

### **1.3. Peta Jalannya penelitian**

#### **1.3.1. Kegiatan penelitian pengusul sebelum topik ini dipilih.**

Kegiatan penelitian pengusul sebelum topik ini dipilih adalah ditentukannya peta kompetensi dosen dengan payung penelitian yang dibuatnya. Peneliti mengembangkan kompetensi dalam pemberdayaan masyarakat dan kajian tentang konflik. Oleh karena itu tahun 2008 mengusulkan Hibah Stranas dan mendapatkan pendanaan tahun 2009 dengan judul Modal Sosial Masyarakat Jawa Timur dalam penyelesaian konflik politik di masyarakat. Dalam penelitian itu, peneliti menyertakan 5 mahasiswa untuk melakukan penelitian berkaitan dengan skripsinya. Lima skripsi tersebut meliputi Modal Sosial untuk penyelesaian Konflik di Kota Surabaya, Kota Malang, Kabupaten Sampang, Kabupaten Madiun, dan Kabupaten Banyuwangi.

Dengan dukungan departemen psikologi sosial untuk mengembangkan kajian tentang konflik, maka penelitian ini menjadi bagian yang sangat penting dalam mengembangkan departemen dan sekaligus kompetensi pribadi dosen.

#### **1.3.2 Penelitian yang direncanakan Saat Kini**

Topik penelitian ini berhubungan dengan kompetensi pengembangan diri dosen di fakultas, yang berhubungan dengan konflik.

Penelitian ini akan dilakukan dalam dua tahapan yang ditetapkan berdasarkan tahun penganggaran.

Tahap I yang dilaksanakan tahun pertama bertujuan untuk pemetaan dan identifikasi Model Penyelesaian Konflik antarnelayan di Kawasan Selat Madura yang Berbasis Kearifan Lokal sebagai Modal Sosial

Tahap II yang akan dilaksanakan pada tahun kedua bertujuan untuk mengimplementasikan model penyelesaian konflik antarnelayan di kawasan Selat Madura yang Berbasis Kearifan Lokal sebagai Modal Sosial.

### 1.3.3 Arah Kegiatan setelah penelitian berakhir

Setelah penelitian tahap pertama berakhir, peneliti melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait untuk mengujicoba model penyelesaian konflik yang telah disusun untuk diujicoba dan diimplementasikan pada kelompok masyarakat nelayan.

Model ini diharapkan menjadi langkah preventif dan sekaligus langkah kuratif dalam penyelesaian konflik nelayan di kawasan Selat Madura.

## BAB II. STUDI PUSTAKA

### 2.1 Definisi Konflik

Istilah konflik ini secara *etimologis* berasal dari bahasa Latin “*con*” yang berarti bersama, dan “*fligere*” yang berarti benturan atau tabrakan. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih (bisa juga kelompok) dimana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya (<http://id.wikipedia.org/wiki/Konflik>).

Dengan demikian konflik dalam kehidupan sosial berarti terjadinya benturan kepentingan, pendapat, harapan yang harus diwujudkan dan sebagainya yang paling tidak melibatkan dua pihak atau lebih, dimana tiap-tiap pihak dapat berupa perorangan, keluarga, kelompok kekerabatan, satu komunitas, maupun satu organisasi sosial pendukung ideologi tertentu, satu organisasi politik, suku bangsa maupun satu pemeluk agama tertentu.

De Dreu dan Gelfand (2008) menyatakan bahwa *conflict as a process that begins when an individual or group perceives differences and opposition between itself and another individual or group about interests and resources, beliefs, values, or practices that matter to*. Dari definisi tersebut tampak bahwa konflik merupakan proses yang mulai ketika individu atau kelompok mempersepsi terjadinya perbedaan atau oposisi antara dirinya dengan individu atau kelompok lain mengenai minat dan

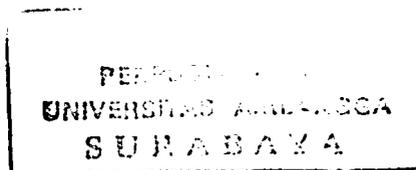
sumber daya, keyakinan, nilai atau praktik-praktik lainnya.

Robbins (2001) menyebut konflik sebagai *a process in which an effort is purposely made by A to offset the efforts of B by some form of blocking that will result in frustrating B in attaining his or her goals or furthering his or her interests*. Dalam definisi ini tampak bahwa konflik dapat terjadi ketika usaha suatu kelompok dihambat oleh kelompok lain sehingga kelompok ini mengalami frustrasi.

Kondalkar (2007) yang mengutip pendapat Thomas menyatakan bahwa konflik sebagai *process that begins when one party perceives that another party has negatively affected something that the first party cares about*. Proses konflik bermula ketika satu partai mempersepsi bahwa partai lain memiliki afeksi (perasaan) negatif.

Kondalkar (2007) juga melanjutkan bahwa *conflict "as a disagreement between two or more individuals or groups, with each individual or group trying to gain acceptance of its views or objective over others*. Dari pendapat ini Kondalkar melihat bahwa konflik merupakan ketidaksetujuan (*disagreement*) antara dua atau lebih individu atau kelompok yang mana masing-masing individu atau kelompok tersebut mencoba untuk bisa diterima panangan atau tujuannya oleh individu atau keompok lain.

Dari pendapat tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa konflik adalah suatu hasil persepsi individu ataupun kelompok yang masing-masing kelompok merasa berbeda dan perdebaan ini menyebabkan adanya



pertentangan dalam ide ataupun kepentingan, sehingga perbedaan ini menyebabkan terhambatnya keinginan atau tujuan pihak individu atau kelompok lain. Dalam Penelitian ini konflik nelayan dapat dimaknai sebagai pertentangan dalam ide maupun kepentingan sehingga perbedaan ini dapat menyebabkan keinginan kelompok nelayan tertentu tidak tercapai.

## 2.2. Macam-Macam Bentuk Konflik

Dilihat dari manifestasinya, Pondy (1969) menggambarkan adanya dua macam bentuk konflik, yaitu konflik yang laten dan konflik yang manifest. Konflik laten meliputi konflik yang dipersepsi dan dirasakan seseorang atau kelompok. Sebaliknya, konflik manifest meliputi konflik yang membutuhkan negosiasi artinya dapat terjadi secara dinamik antar individu ataupun antar kelompok. Konflik ini sering memunculkan terjadinya penyimpangan (*violence*).

Ditinjau dari tingkat analisisnya, maka konflik dapat diklasifikasi dalam beberapa tingkatan, yaitu: tingkatan individual, tingkatan kelompok, tingkatan organisasi. Pada tingkatan individual, konflik dapat terjadi karena predisposisi (seperti dogmatisme, persetujuan, motif kekuasaan), atau karakteristik pekerjaan (seperti ambiguitas kerja, anatomi pekerjaan), proses konfliknya meliputi konflik pada kondisi motivasi, kognisi, afeksi, dan efeknya dapat terjadi pada kesejahteraan dan kesehatan, tingkat absensi dan pindah kerja (Kondalkar, 2007).

Ditinjau dari fungsinya bagi individu ataupun organisasi, Kondalkar (2007) melihat bahwa konflik itu dapat dibedakan dalam dua macam yaitu konflik fungsional dan konflik disfungsional. Konflik dikatakan fungsional apabila: (1) konflik dapat meningkatkan kekompakan anggota dalam organisasi sehingga tujuan kelompok menjadi prioritas. (2). konflik dapat mendorong munculnya inovasi dan kreativitas ketika merasa adanya semangat berkompetisi di dalam kelompok, (3). konflik dapat meningkatkan lingkungan kerja dan meningkatkan kesempatan untuk pengembangan diri (*self-development*) suatu kelompok sehingga mendorong terbentuknya norma kelompok, (4). meningkatkan budaya kerja yang mendukung peningkatan berbagai sistem dalam organisasi dan akhirnya pertumbuhan dapat tercapai.

Konflik menjadi dis-fungsional ketika dalam konflik tersebut dapat diidentifikasi adanya beberapa gejala berikut: (1) ketika konflik tidak mendorong adanya solusi, (2) ketika tujuan dasar (*basic goals*) organisasi ditolak, (3) orang diperlakukan tidak bertanggung jawab, yang menyebabkan ketidakpercayaan dan berkembangnya antagonisme dan konflik, (4) konflik mendorong terjadinya peningkatan tingkat ketidakhadiran dan keluarnya anggota kelompok, (5) munculnya gaya manajemen ganda yang menghasilkan kebingungan dan konflik disfungsional, (6) terjadinya ketidaksetujuan dalam manajemen yang berakibat pada disloyalitas, dan hilangnya keinginan anggota untuk menunjukkan kreativitas kerja.

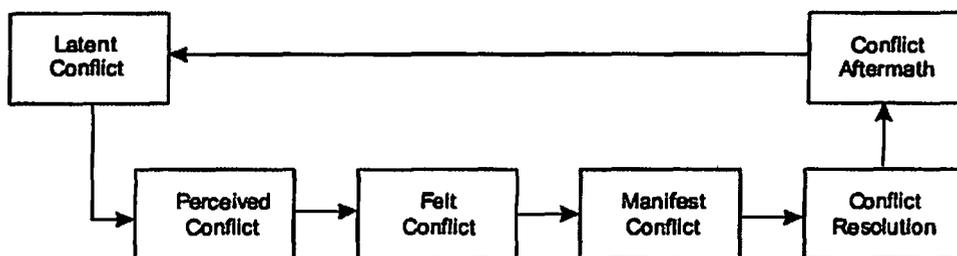
Pada studi ini, macam konflik nelayan akan dicoba untuk didekati dengan macam-macam konflik tersebut diatas, misalnya konflik laten vs konflik manifes, konflik fungsional vs konflik disfungsional, konflik individual vs konflik kelompok ataupun organisasional. Apabila dari hasil lapangan menunjukkan bentuk konflik lainnya, maka bentuk-bentuk konflik itu akan dijadikan sebagai kasanah kajian dan temuan baru mengenai konflik yang terjadi.

### 2.3. Proses Terjadinya Konflik

Pondy (1967) menggambarkan konflik dalam empat cara (tahapan), yaitu: (1). berawal dari adanya keterbatasan sumberdaya, (2). Munculnya perasaan individu seperti adanya stress, ketegangan, permusuhan (*hostility*), kecemasan (*anxiety*), (3). Adanya keadaan kognitif individu yang menghasilkan persepsi atau kesadaran adanya situasi konflik, dan (4). Munculnya perilaku konflik itu sendiri yang merentang mulai dari resistensi hingga agresi yang nyata. Keempat hal ini dapat dilihat seperti model pada gambar 2.1

Charles Watkins menyatakan bahwa konflik dapat terjadi bila terdapat dua hal. Pertama, konflik bisa terjadi bila sekurang-kurangnya terdapat dua pihak yang secara potensial dan praktis/ operasional dapat saling menghambat. Secara potensial artinya, mereka memiliki kemampuan untuk menghambat. Secara praktis/operasional maksudnya

kemampuan tadi bisa diwujudkan dan ada didalam keadaan yang memungkinkan perwujudannya secara mudah. Artinya, bila kedua belah pihak tidak dapat menghambat atau tidak melihat pihak lain sebagai hambatan, maka konflik tidak akan terjadi. Kedua, konflik dapat terjadi bila ada sesuatu sasaran yang sama-sama dikejar oleh kedua pihak, namun hanya salah satu pihak yang akan memungkinkan mencapainya (<http://grms.multiply.com/journal/item/28>).



Gambar 2.1. Episode Proses Konflik dari Pondy

Sumber: Kondalkar, (2007. hal. 167)

Selain kedua ahli di atas, perkembangan konflik juga mendapatkan kajian dari Ronald C Phillips (1988) yang menggambarkan tahapan 5 tahapan konflik.

Pada Tabel 2.1 tersebut di atas, perkembangan konflik terjadi dalam 5 tahapan. Pada tahap pertama, konflik baru saja dimulai. Pada tahapan ini apabila konflik teridentifikasi, maka biasanya konflik tersebut mudah dikendalikan. Pada tahap ini, pihak yang berkonflik ingin mengetahui mengapa terjadi perbedaan dan apa solusi terbaik yang

mungkin diberikan. Pihak yang berkonflik meyakini bahwa resolusi akan menguntungkan setiap orang.

Tabel 2.1. Tahapan Perkembangan Konflik

Stage 5 All-Out War  
 Stage 4 Limited Warfare  
 Stage 3 Contention  
 Stage 2 Dispute  
 Stage 1 Just Begun

Sumber : dari Ronald C. Phillips, "Manage Differences Before They Destroy Your Business," *Training and Development Journal*, 42(9): 1988, 66-71.

Apabila konflik pada tahap pertama tidak dapat dipecahkan, maka tahap kedua konflik akan terjadi. Para pihak yang berkonflik menganggap bahwa kemungkinan mampu membuat resolusi konflik sangat kecil. Harapannya sekarang adalah bahwa konflik dapat segera ditangani sehingga kerugian kepada pihak yang berkonflik dapat ditekan seminimal mungkin.

Jika resolusi konflik tahap kedua masih belum tercapai juga, maka tahapan perkembangan konflik yang ketiga akan terjadi. Tahap ketiga ini dikenal dengan tahap pertentangan (*contention stage*). Pada tahap ini resiko menang-kalah akan terjadi. Segala upaya untuk memenangkan konflik dirancang. Pihak yang berkonflik mulai menjalankan trik kotor agar bisa mengalahkan satu sama lain. Seringkali, pihak ketiga masuk dan

mulai memilih pihak yang akan menjadi “pemenang” dan pihak yang akan menjadi “pecundang” dalam konflik.

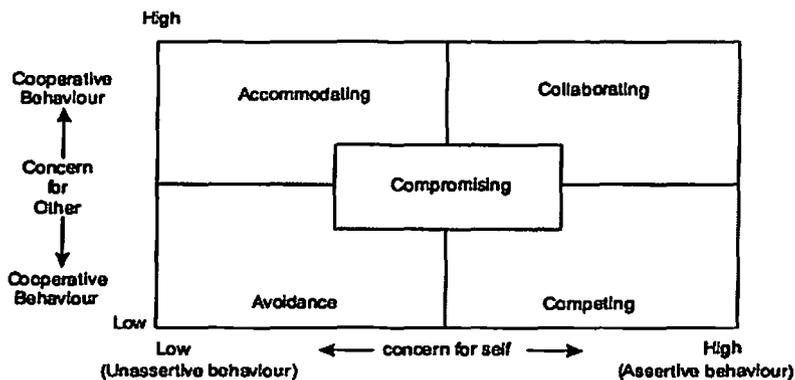
Tahapan keempat konflik dikenal dengan *conflict's progression*. Tujuannya adalah untuk mengurangi kekuatan musuh sehingga individu tidak lagi menjadi ancaman. Keamanan pribadi terancam oleh perjuangan dalam memenangkan konflik ini. Peran mediator dari pihak ketiga mungkin akan diperlukan untuk mengatasi dan menyelesaikan konflik pada tahapan ini, sehingga konflik tidak berkelanjutan.

Tahap terakhir yang paling parah dari konflik yaitu tahapan perang habis-habisan (*all-out war*). Pada tahapan ini, posisi kekuasaan telah terpolarisasi dalam kelompok-kelompok dan masing-masing mencoba untuk benar-benar mendominasi pihak lain. Kerugian dan keuntungan sudah tidak lagi diperhatikan. Dalam konflik ini yang dicari hanyalah perasaan kemenangan dan keadilan.

Pemahaman tentang tahapan konflik ini sangat penting untuk dipahami, karena dengan pemahaman ini diharapkan konflik akan dapat diselesaikan dengan baik. Pada studi ini, eskalasi konflik akan dicoba untuk dilihat, apakah prosesnya juga mengikuti pola eskalasi yang tersebut. Apabila proses konflik seperti yang dikemukakan oleh Pondy dan ahli lain seperti di atas, maka konflik nelayan akan mendukung pola yang ada, namun apabila tidak, maka variasi pola eskalasi konflik yang ditemukan di lapangan akan menjadi teori baru yang dapat menambah khasanah keilmuan psikologi, khususnya pola dan eskalasi konflik.

## 2.4. Model Resolusi Konflik

Robbin (2001) menggambarkan resolusi konflik dalam lima modus seperti pada gambar berikut ini.



Gambar 2.2 Model resolusi Konflik

Sumber : Kodnalkar, (2007)

1. **Avoidance.** Pada model resolusi konflik ini satu atau kedua partai, kelompok menghindari konflik. Situasi kelompok tidak memungkinkan untuk bertindak kooperatif dan asertif, dan masing-masing pihak yang berkonflik menghindari pertemuan langsung.
2. **Competing.** Strategi konflik ini diadopsi manakala strategi lain tidak dapat bekerja dengan baik. Kompetisi akan berguna dalam situasi darurat (emergensi) yaitu ketika keputusan cepat harus diambil. Dalam strategi ini, senjata dan kekuatan harus dimanfaatkan secara optimal sehingga penyelesaian segera berakhir. Strategi ini didasarkan pada prinsip manajemen konflik *win-lose principle*.

3. **Collaborating.** Adalah strategi yang melibatkan usaha satu partai untuk bekerjasama dengan partai lainnya dan mencoba menemukan solusi pemecahan masalah yang menguntungkan. Strategi ini menjadi penting ketika solusi yang dibuat menguntungkan kedua belah pihak.
4. **Accommodating.** Dalam strategi akomodasi, orang akan merelakan interesnya untuk diakomodasikan dengan interes orang lain. dalam akomodasi, kedirian dihilangkan dan yang ada bagaimana seseorang menuruti pandangan orang lain. Strategi ini dilakukan karena yang dihadapi adalah orang yang memiliki kekuasaan yang lebih kuat, cukup beralasan dan adanya kemauan baik.
5. **Compromising.** Dalam situasi konflik ini, strategi ini dipilih kedua partai ketika mereka sama-sama ingin mencari solusi yang saling menguntungkan dan bias diterima kedua belah pihak. Dalam kompromi, tidak diketahui siapa yang kalah dan siapa yang menang. tidak ada satu pun partai ada yang merasa puas dengan adanya kompromi ini.

## 2.5. **Konflik Antarnelayan**

Satria menyatakan bahwa secara umum konflik antarnelayan dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat) macam, yaitu : (1) konflik kelas, (2) konflik orientasi, (3) konflik agraria, dan (4) konflik primordial. Konflik kelas atau disebut juga konflik vertikal, yakni konflik antara nelayan perikanan industri dengan nelayan perikanan rakyat. Hal ini biasanya dipicu oleh perbedaan upaya tangkap (*effort*), yang dicerminkan oleh

ukuran kapal dan penerapan teknologi. Pada perikanan industri, kapal yang digunakan berukuran relatif besar dan menerapkan teknologi maju. Sedangkan pada perikanan rakyat, kapalnya lebih kecil dan teknologi yang diterapkan sederhana. Perbedaan ini mengakibatkan timbulnya kecemburuan sosial, karena hasil tangkapan nelayan perikanan industri lebih banyak dibanding perikanan rakyat. Disamping itu, nelayan perikanan rakyat merasa khawatir hasil tangkapannya akan semakin menurun karena sumber daya ikan yang tersedia ditangkap oleh kapal-kapal berukuran besar (Republika, 17 Agustus 2003)

Hasil penelitian Hikmah (2008) menunjukkan bahwa terdapat 6 (enam) tipologi konflik kenelayan di wilayah perairan Selat Madura, provinsi Jawa Timur yaitu: konflik kepemilikan sumberdaya, konflik pengelolaan sumberdaya, konflik cara produksi/alat tangkap, konflik lingkungan, konflik usaha dan konflik primordial. Konflik cenderung terbuka dan bernuansa kekerasan seperti pada kasus konflik antara nelayan Batah, Kecamatan Kwanyar dengan nelayan-nelayan Kabupaten Sampang dan Kabupaten Pasuruan. Isu utama yang menjadi akar permasalahan konflik adalah berkaitan dengan isu keterbatasan sumberdaya perikanan Selat Madura yang telah *overfishing*.

Konflik orientasi yaitu konflik antara nelayan yang berorientasi pasar dengan nelayan yang masih terikat nilai-nilai tradisional. Nelayan yang berorientasi pasar biasanya mengabaikan aspek kelestarian untuk mendapatkan hasil tangkapan sebanyak-banyaknya. Dalam praktiknya,

nelayan tersebut sering menggunakan alat tangkap yang merusak sumber daya ikan dan lingkungannya, misalnya bahan peledak dan bahan beracun. Di sisi lain, sebagian nelayan sangat peduli terhadap kelestarian sumber daya ikan, sehingga mereka menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan.

Konflik agraria yaitu konflik perebutan penangkapan (*fishing ground*), biasanya terjadi antarnelayan yang berbeda domisilinya. Konflik seperti ini yang sekarang sedang marak, sebagai dampak euforia otonomi daerah. Sedangkan konflik primordial terjadi sebagai akibat perbedaan identitas atau sosial budaya, misalnya etnik dan daerah asal. Konflik ini agak kabur sebagai konflik tersendiri, karena seringkali sebagai selubung dari konflik lainnya yakni konflik kelas, konflik orientasi maupun konflik agraria.

## 2.6. Penyebab Konflik Nelayan

Hasil temuan lapang kegiatan studi, maka faktor pemicu konflik nelayan di perairan Selat Madura bisa dipisahkan karena penggunaan alat tangkap *Mini-Trawl* (Tongep), pelanggaran terhadap jalur penangkapan ikan, penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan (*destruktif*), seperti peledak dan potasium, dan perbedaan metode operasi alat tangkap.

Konflik karena pelanggaran terhadap jalur penangkapan terjadi pada hampir seluruh daerah, walaupun tidak ada batas fisik yang jelas tentang jalur penangkapan ikan (Darmawan O. Sutjipto, 2012. Mengingat

ketersediaan sumber daya perikanan laut kian hari kian berkurang, maka dapat diperkirakan bahwa akan terjadi peningkatan intensitas konflik sosial dikalangan nelayan di Indonesia. Hal ini sesuai dengan teori Mac Neil (1991) yang menyatakan bahwa konflik yang didasarkan pada perubahan iklim dan gangguan lingkungan dan air dan kelangkaan sumber daya dapat menjadi endemik dunia di masa datang.

## **2.7. Karakteristik Masyarakat Nelayan**

Nelayan identik dengan kemiskinan. Ada banyak penyebab terjadinya kemiskinan pada masyarakat nelayan, seperti kurangnya akses kepada sumber-sumber modal, akses terhadap teknologi, akses terhadap pasar maupun rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam. Alasan lain dan yang akan banyak dibahas disebabkan karena faktor-faktor sosial seperti pertumbuhan jumlah penduduk yang tinggi, rendahnya tingkat pendidikan, dan rendahnya tingkat kesehatan serta alasan-alasan lainnya seperti kurangnya prasarana umum di wilayah pesisir, lemahnya perencanaan spasial yang mengakibatkan tumpang tindihnya beberapa sektor pada satu kawasan, polusi dan kerusakan lingkungan. Selama ini, baik pada masa orde baru maupun masa sesudahnya telah banyak intervensi yang dilakukan oleh Pemerintah, namun tetap saja keluarga nelayan masih belum dapat diberdayakan menjadi lebih mandiri.

## 2.8. Kearifan Lokal sebagai Modal Sosial dan Solusi Konflik Nelayan

Kasus-kasus konflik sosial di Indonesia dapat ditengarai karena gagalnya masyarakat Indonesia untuk membangun suatu interaksi sosial. Ketidakberhasilan dalam mengembangkan interaksi sosial tersebut disadari bahwa bangsa Indonesia merupakan suatu negara yang amat beragam seperti suku, agama, bahasa, dan budaya. Latar belakang keragaman tersebut memang menciptakan potensi konflik yang bisa mengakibatkan memudarnya nilai-nilai kearifan lokal yang berupa modal sosial.

Teezzi, Marchettini, dan Rosini mengatakan bahwa akhir dari sedimentasi kearifan lokal ini akan mewujudkan menjadi tradisi atau agama. Dalam masyarakat kita, kearifan-kearifan lokal dapat ditemui dalam nyayian, pepatah, sasanti, petuah, semboyan, dan kitab-kitab kuno yang melekat dalam perilaku sehari-hari. Kearifan lokal biasanya tercermin dalam kebiasaan-kebiasaan hidup masyarakat yang telah berlangsung lama. Keberlangsungan kearifan lokal akan tercermin dalam nilai-nilai yang berlaku dalam kelompok masyarakat tertentu. Nilai-nilai itu menjadi pegangan kelompok masyarakat tertentu yang biasanya akan menjadi bagian hidup tak terpisahkan yang dapat diamati melalui sikap dan perilaku mereka sehari-hari (<http://www.scribd.com/doc/52730293/Artikel-Pertanian>)

Melihat realitas itu maka mengembangkan kearifan lokal yang menjadi modal sosial dapat dijadikan alternatif solusi untuk menyelesaikan

konflik sosial di Indonesia. Mengapa modal sosial bisa menjadi solusi efektif untuk mengatasi dan mencegah konflik sosial di Indonesia? Hermawanti dan Rinandari (2005) mengungkapkan bahwa masyarakat Indonesia sebenarnya merupakan masyarakat komunal yang mempunyai banyak nilai yang dapat menguatkan modal sosial. Modal sosial tersebut sebenarnya merupakan salah satu alternatif untuk memberdayakan masyarakat. Modal sosial dapat digunakan sebagai sarana pemberdayaan masyarakat karena memberikan pencerahan kebersamaan, toleransi, dan partisipasi.

Fukuyama (2002) menambahkan bahwa modal sosial adalah kapabilitas yang muncul dari kepercayaan umum di dalam sebuah masyarakat yang diciptakan dan ditransmisikan melalui mekanisme kultural, seperti tradisi, agama, atau kebiasaan sejarah. Kalau kearifan lokal menjadi modal sosial, maka proses tersebut dapat menumbuhkan komunitas spontan yang bergantung pada kepercayaan. Kepercayaan sendiri ditentukan secara kultural yang dapat menghidupkan pengharapan berperilaku normal, jujur, dan kooperatif demi kepentingan bersama dalam suatu komunitas masyarakat.

Berdasarkan pandangan itu menjadi pijakan untuk menjelaskan bahwa modal sosial yang berasal dari kearifan lokal dapat digunakan guna meredam dan mengantisipasi konflik sosial di Indonesia. Kearifan lokal akan menjadi modal sosial karena dengan modal sosial yang berasal dari kebijaksanaan lokal dapat menjadi perekat sosial. Ketika dalam suatu

masyarakat telah tumbuh modal sosial yang baik, maka tidak akan terjadi konflik sosial. Perbedaan-perbedaan kepentingan, masalah-masalah yang timbul karena tujuan berbeda, atau perebutan akses sumber daya dapat diselesaikan dengan cara bijaksana dan damai. Cara ini dapat ditempuh karena suatu masyarakat yang memiliki modal sosial telah memiliki pencerahan kebersamaan, toleransi, dan partisipasi. Hal lain yang dimiliki modal sosial dalam suatu masyarakat yaitu adanya kepercayaan yang tumbuh pada komunitas yang diilاندasi dengan kejujuran, kooperatif, dan tingkat kesadaran demi kepentingan bersama.

Modal sosial dapat dijadikan peredam konflik karena perbedaan-perbedaan tujuan yang mengemuka itu dapat diatasi dengan rasa kebersamaan, kepercayaan, kejujuran, dan saling menghargai. Bermodalkan unsur-unsur ini yang merupakan variabel penentu bagi terciptanya modal sosial, maka selebar apapun jurang perbedaan akan dapat diselesaikan dengan damai.

Modal sosial sebagai solusi untuk mencegah atau mengatasi konflik bisa berhasil dengan baik apabila didukung faham multikulturalisme. Multikulturalisme memberikan sumbangan penting guna mengembangkan modal sosial karena melihat realitas keanekaragaman kultural di Indonesia. Modal sosial dapat dijalankan dengan tuntas apabila tumbuh kesediaan untuk mengakui adanya keberagaman. Sebaliknya tidak ada pengakuan terhadap keberagaman yang melingkupi kehidupan berbangsa dan bernegara, maka modal sosial

tidak dapat ditumbuhkan dengan semestinya.

Multikulturalisme menunjukkan peran yang amat penting bagi modal sosial sebagai alternatif mencegah konflik sosial, maka perlu dikembangkan dalam kehidupan masyarakat. Berry, Poortinga, Segall, dan Dasen (1999) menjelaskan multikulturalisme sebagai konteks sosiopolitis yang memungkinkan individu dapat mengembangkan kesehatan jati diri dan secara timbal balik mengembangkan sikap-sikap antar kelompok secara positif. Kebijakan-kebijakan multikulturalisme antara lain dapat diwujudkan melalui pluralisme. Yaqin (2005) menambahkan bahwa implementasi multikulturalisme melalui jalur pendidikan pada masyarakat. Pendidikan multikulturalisme ini menawarkan gagasan melalui penerapan strategi dan konsep pendidikan yang berbasis pada keragaman yang ada di masyarakat menyangkut keragaman etnis, budaya, bahasa, agama, status sosial, gender, kemampuan, umur, dan ras.

Budianta (2005) lebih jauh menjelaskan tentang mensosialisasikan multikulturalisme melalui pendidikan yaitu kurikulum yang mencerminkan pluraitas masyarakat, termasuk masyarakat yang terpinggirkan; merajut ingatan kolektif masyarakat yang inklusif. Budianta secara detail mengungkap praktik multikulturalisme melalui jalur pendidikan formal (revisi kurikulum) dan informal (media massa, suri tauladan, berbagi pengalaman).

Pendidikan multikulturalisme ini dinilai strategis dan efektif karena

dapat menghilangkan prasangka. Baron dan Byrne (1997) menyebut prasangka sebagai sikap negatif terhadap kelompok lain yang bisa menyebabkan tindakan diskriminatif terhadap kelompok yang berbeda.

Aronson, Wilson, dan Akert (2005) menjelaskan sikap sebagai kecenderungan perilaku yang terbangun dari aspek kognitif, afeksi, dan konasi. Berdasarkan pengertian ini maka sikap negatif yang melekat dan kuat akan menimbulkan tindakan diskriminasi yang dapat memicu terjadinya konflik. Selain prasangka, multikulturalisme dapat meminimalisir stereotipe. Myers (2002) menjelaskan stereotipe secara spesifik sebagai evaluasi negatif terhadap kelompok lain yang merupakan akibat dari kategori kognitif sederhana.

Ketika prasangka dan stereotipe masih hadir dalam diri seseorang atau kelompok maka akan menghambat multikulturalisme. Terhambatnya multikulturalisme berarti juga mengganggu terbangunnya modal sosial. Dengan demikian perlu mengembangkan pendidikan multikulturalisme sebagai pondasi untuk membangun modal sosial yang didasarkan pada kearifan lokal

## **BAB III TUJUAN, URGENSI DAN MANFAAT**

### **3.1 Tujuan Khusus**

Tujuan Khusus penelitian ini dibagi pada dua tahun, yaitu:

Penelitian Tahun Ke-1

- a. Mengidentifikasi bentuk konflik nelayan di kawasan Selat Madura
- b. Mengidentifikasi pola konflik yang terjadi di kawasan Selat Madura
- c. Mengidentifikasi pola penyelesaian konflik nelayan yang dilakukan saat ini.
- d. Mengidentifikasi sumber-sumber kearifan lokal yang dapat dijadikan modal sosial untuk menyelesaikan konflik nelayan.

Penelitian Tahun Ke-2

- a. Menguji model penyelesaian konflik nelayan berbasis kearifan lokal sebagai modal sosial di kawasan Selat Madura
- b. Mengimplementasikan model penyelesaian konflik nelayan di kawasan Selat Madura berbasis kearifan lokal sebagai modal sosial

### **3.2 Urgensi (Keutamaan) Penelitian**

Penelitian ini penting untuk dilakukan mengingat beberapa pertimbangan:

1. Urgensinya untuk menjaga integrasi kebangsaan dan harmoni sosial  
Riset ini sesuai dengan isu strategis yaitu integrasi rasa nasionalisme dan

erosi ideologi dikarenakan beberapa pertimbangan:

- a. Masyarakat kawasan Selat Madura adalah masyarakat plural yang terdiri dari Madura, Pandalungan, Osing, dan Jawa, sehingga dengan perbedaan kultur ini dan didorong kepentingan ekonomi dan sosial akan berpotensi untuk mengikis rasa nasionalisme yang menyatukan bangsa, sehingga perbedaan tersebut dapat menjadi potensi mengancam disintegrasi bangsa.
  - b. Konflik antar-nelayan yang terjadi di kawasan Selat Madura masih ditangani menggunakan pendekatan hukum, dan penyelesaian konfliknya bersifat insidental dan kasuistis
2. Urgensinya untuk peningkatan kesejahteraan para nelayan  
Masyarakat di kawasan tapal kuda umumnya adalah masyarakat yang miskin. Di Sampang penerima raskin mencapai 140.357 RTS. Kemudian, secara berurutan Sumenep 139.780 RTS, Pamekasan 112.320 RTS, dan Bangkalan 97.628 RT. ([Shttp://www.berita8.com/read/2009/02/13/2/8383/Raskin-Di-Madura-Bengkak-20-Ribu-RTS](http://www.berita8.com/read/2009/02/13/2/8383/Raskin-Di-Madura-Bengkak-20-Ribu-RTS)). Angka ini sangat besar dibandingkan kota/kabupaten di Jawa pada umumnya, sehingga peran laut menjadi tempat pencaharian sangat penting bagi warga Madura.
  3. Urgensinya untuk pelestarian lingkungan  
Kawasan Selat madura merupakan kawasan yang termasuk dalam tangkap lebih (*overfishing*), oleh karena itu dibutuhkan suatu pengelolaan kawasan yang tetap menjaga kelestarian lingkungan.
  4. Urgensinya untuk penetapan kebijakan publik

Pemerintah harus membuat kebijakan publik yang mampu memberikan pelayanan optimal bagi warganya untuk dapat mengakses kesempatan berekonomi secara berkeadilan. Oleh karena itu dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang proporsional, sehingga tidak sampai terjadi konflik dan pemerintah ikut bertanggung jawab dalam pembuatan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat nelayan.

5. Urgensi untuk penyertaan kearifan lokal sebagai modal sosial dalam penelitian

Kearifan lokal (*local wisdom*) merupakan bagian dari sistem budaya, biasanya berupa larangan-larangan (tabu-tabu) yang mengatur hubungan sosial maupun hubungan manusia dengan lingkungan Alamnya. Kearifan lokal berfungsi untuk menjaga kelestarian dan kesinambungan “aset” yang dimiliki suatu masyarakat sehingga masyarakat dapat terpenuhi kebutuhan-kebutuhannya dari generasi ke generasi berikutnya, tanpa harus merusak atau menghabiskan “aset” tersebut. Sebagai suatu modal dalam penyelesaian konflik, nilai-nilai dalam kearifan lokal dapat menjadi modal sosial untuk menyelesaikan konflik antarnelayan. Modal sosial yang berupa kepercayaan, jaringan sosial dan norma (Putnam,1995) serta adanya sumberdaya yang melekat dalam jaringan sosial (Lin, 2001) akan dapat digunakan untuk menyelesaikan konflik politik di masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini akan memfokuskan pada permasalahan

6. Urgensi untuk pertimbangan akademik

Penelitian tentang konflik merupakan penelitian payung yang

dikembangkan Departemen Psikologi Sosial. Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan kepada pemerintah dan masyarakat secara lebih nyata. Selain itu, dengan penelitian ini akan terbantu sejumlah mahasiswa yang sedang memprogram tugas akhirnya skripsi sehingga penyelesaian skripsinya lebih cepat.

### **2.3. MANFAAT PENELITIAN**

#### **1. Manfaat Teoretik**

- a. Mengembangkan teori konflik, khususnya pada setting kehidupan nelayan
- b. Menggali informasi pengetahuan yang berhubungan dengan kearifan lokal sebagai modal sosial masyarakat dalam menyelesaikan konflik
- c. Diketemukannya model penyelesaian konflik antar nelayan yang lebih terintegratif karena memiliki cakupan kewilayahan yang lebih luas

#### **2. Manfaat Praktis**

- a. Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam membuat kebijakan publik yang berhubungan dengan penyelesaian konflik antar nelayan
- b. Dapat diimplementasikan dalam bentuk pelatihan pencegahan dan penyelesaian konflik nelayan

## **BAB IV. METODE PENELITIAN**

### **4.1 Tipe Penelitian**

Tipe penelitian ini adalah penelitian adalah penelitian eksploratif dan deskriptif-analitik. Dikatakan penelitian eksploratif, karena peneliti berusaha untuk mengeksplorasi permasalahan modal sosial dan penyelesaian konflik politik lebih mendalam dalam masyarakat. Dikatakan penelitian deskriptif analitik, karena hasil eksplorasi akan dideskripsikan serta dianalisis secara mendalam permasalahan yang diperoleh dari data lapangan, sehingga terdapat kedalaman dalam kajiannya

### **4.2 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini di wilayah Selat Madura (1) Wilayah ini memiliki potensi konflik nelayan yang besar dibandingkan daerah lain di Jatim. (2) Selat Madura merupakan kawasan yang strategis untuk menghubungkan kabupaten-kabupaten di daratan Jawa Timur dengan Pulau Madura. Beberapa kabupaten yang menjadi lokasi penelitian yaitu: Kabupaten Gresik, Kota Surabaya, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Banyuwangi.

### **4.3 Sumber Data Penelitian**

Informan penelitian ini adalah para nelayan, kelompok nelayan, tokoh masyarakat nelayan di wilayah Selat Madura dan para pejabat yang

berwewenang yang dapat memberikan informasi mengenai kearifan lokal sebagai modal sosial dalam penyelesaian konflik nelayan masyarakat Jawa Timur. Dipilihnya para informan penelitian ini dikarenakan mereka adalah orang yang mengetahui baik langsung maupun tidak langsung kasus-kasus konflik nelayan yang terjadi serta mampu menggali modal sosial masyarakat sekitar kejadian konflik. Selain itu, informasi juga diambilkan dari data sekunder yang berhubungan dengan topik penelitian ini.

#### **4.4 Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dilakukan dengan melalui teknik wawancara mendalam (*Depth interview*), *Focus Group Discussion* (FGD), dan observasi lapangan. Data lapangan kemudian ditranskrip dalam bentuk verbatim. Data verbatim kemudian dikoding untuk menemukan unit-unit analisis. Analisis hasil penelitian kemudian ditabulasikan sesuai dengan tujuan penelitian dan relevansi data, baik data wawancara, FGD, maupun catatan observasi.

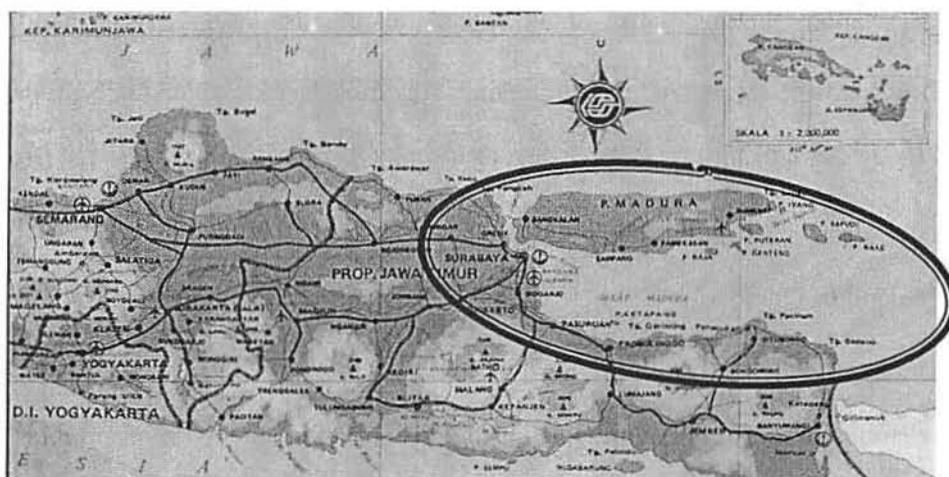
#### **4.5 Analisis dan Interpretasi Data**

Interpretasi hasil penelitian didasarkan pada hasil analisis data penelitian dengan setia pada perspektif penelitian dengan memanfaatkan kajian teoritis dan hasil penelitian empiris yang tersedia dan relevan dengan tujuan penelitian.

## BAB V HASIL PENELITIAN

### 5.1 Gambaran Umum Selat Madura

**Aspek Geografis.** Posisi Selat Madura pada koordinat  $110^{\circ}54 - 115^{\circ}57$  BT,  $5^{\circ}371 - 8^{\circ}48$  LS. Wilayah Selat Madura merupakan wilayah selat yang menghubungkan Pulau Jawa dengan Pulau Madura. Selat ini dibatasi oleh desa-desa dan kota pesisir yang membentang mulai dari Ujung Pangkah di Gresik hingga Ketapang di Banyuwangi, sementara itu disisi Pulau Madura, selat Madura terbentang di sepanjang pesisir desa-desa di Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan hingga pesisir-pesisir di gugusan pulau di Kabupaten Sumenep. Dilihat dari peta Kabupaten Sumenep, maka gugusan pulau-pulau yang memiliki bibir pantai di Selat Madura yaitu: Pulau Gili Raja, Pulau Gili Genting, Pulau Sapudi, Pulau Raas, Pulau Tonduk, dan Pulau Guwa-Guwa.



Gambar 6.1. Gambar dalam Lingkaran adalah Selat Madura

Kabupaten yang berada di bibir pantai Selat Madura selain kabupaten-kabupaten yang ada di Pulau Madura adalah Kabupaten Gresik, Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kota Pasuruan, Kabupaten Pasuruan, Kota Probolinggo dan Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Situbondo, dan Kabupaten Banyuwangi. Adapun kabupaten-kabupaten yang berada di Pulau Madura antara lain Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan dan Kabupaten Sumenep.

**Aspek oseanografi.** Selat Madura tergolong laut dangkal. Kedalaman laut di selat ini antara 0 – 50 meter, dan semakin ke timur mendekati Selat Bali kedalamannya mencapai 200m. Pendangkalan terjadi karena sedimen sejumlah sungai besar yang berasal dari pegunungan yang akhirnya bermuara di selat ini. Ada sejumlah sungai yang memberikan andil besar pada pendangkalan selat ini, yaitu Sungai Bengawan Solo di Gresik, Sungai Kalimas Surabaya, Sungai Porong di Sidoarjo, Sungai Lawean, Sungai Gembong, Sungai Kedunglarangan, Sungai Welang, dan Sungai Rejoso di Pasuruan, Sungai Pekalen di Probolinggo, Sungai Rondho Ningo di Probolinggo, Sungai Kemuning di Pamekasan, serta masih banyak lagi sungai yang mengalirkan lumpurnya di Selat Madura. Dengan munculnya kasus pembuangan lumpur di Sungai Porong, maka pendangkalan Selat Madura semakin meningkat.

Pelayaran kapal kecil dan tradisional hingga kapal di atas 30 GT, tidak akan banyak mengalami kendala ketika berlayar di Selat ini. Gelombang lautnya relatif rendah, karena Selat ini diapit oleh sejumlah

pulau dan pegunungan dari berbagai sudutnya. Di sisi utara, ada Pulau Madura dengan sejumlah gunung kapurnya bisa menghalangi laju kecepatan angin. Sementara itu di sisi selatan, sejumlah gunung dan dataran tinggi di sepanjang bibir pantai mulai dari Pasuruan hingga Banyuwangi juga dapat menghalangi laju kecepatan angin. Dari sisi barat, ada dataran rendah Surabaya dan Sidoarjo yang anginnya tidak terlalu kencang, dan dari sisi timur terbentang selat Bali yang mungkin anginnya agak kencang.

**Aspek Kultural.** Ditinjau dari kultur penduduknya, wilayah Selat Madura dihuni oleh beberapa kelompok masyarakat dengan budaya yang bervariasi. Di Gresik, Surabaya, dan Sidoarjo, budaya arek dan Mataraman cukup kental. Sementara itu di Kota dan Kabupaten Pasuruan diwarnai oleh kultur campuran antara Jawa dengan Madura (Pendhalungan), dan di kawasan Probolinggo hingga Situbondo juga sangat dominan kultur Pendhalungannya, dan di Banyuwangi diwarnai kultur Jawa, Osing, dan Pendhalungan.

Karakteristik masyarakat Pendhalungan ini, dalam berinteraksi dengan masyarakat lain umumnya menggunakan bahasa Madura dan bahasa Jawa Kasar. Bahasa Jawa kasar lazim dipakai di daerah Pasuruan, dan Probolinggo Kota. Dilihat dari bangunan rumahnya, warga di kawasan Selat Madura memiliki bangunan bergaya Jawa-Madura juga masih dapat dijumpai di Situbondo.

Masyarakat Pendhalungan sendiri dapat digolongkan menjadi beberapa kelompok, yakni: (1). Pendetang asli dari Pulau Madura yang berpindah ke ujung Timur Jawa mulai berabad-abad silam. Masyarakat Pendhalungan di bagian timur Jawa, khususnya Situbondo dan Bondowoso, umumnya berasal dari Pamekasan dan Sumenep, (2) Masyarakat Jawa yang akhirnya 'termadurakan' karena hidup dikelilingi pendatang Madura. Mereka ini umumnya dibesarkan dan hidup ditengah masyarakat Madura serta akhirnya berbudaya campuran, (3) Pendhalungan yang merupakan hasil perkawinan campuran antara orang Jawa dan Madura, demikian pula sebaliknya.

Dari segi watak, sebagian besar masyarakat Pendhalungan memiliki sifat khas Madura, yakni keras, mudah naik darah, tangguh, pekerja keras, namun juga setia. Sifat-sifat Jawa juga masuk dalam diri masyarakat *pendhalungan* yang merupakan campuran Jawa dan Madura namun budaya dan bahasanya tetap Madura.

## **5.2. Jalur / Zonasi Penangkapan Ikan**

Sub bab ini dijadikan sebagai sub bab tersendiri karena banyak kasus konflik nelayan diakibatkan adanya pelanggaran mengenai aturan yang sudah dibuat.

Bedasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 392/Kpts/Ik.120 /4/99 Tentang Jalur-Jalur Penangkapan Ikan Wilayah Perikanan Republik,

maka intinya berhubungan dengan zonasi, alat tangkap dan berat kapal.

Menurut zonasinya, Indonesia dibagi menjadi 3 (tiga) Jalur Penangkapan Ikan, yaitu: Jalur Penangkapan Ikan I, Jalur Penangkapan Ikan II, dan Jalur Penangkapan Ikan III.

Jalur Penangkapan Ikan I meliputi perairan pantai diukur dari permukaan air laut pada surut yang terendah pada setiap pulau sampai dengan 6 (enam) mil laut ke arah laut. Perairan pantai yang diukur dari permukaan air laut pada surut yang terendah sampai dengan 3 (tiga) mil laut; perairan pantai di luar 3 (tiga) mil laut sampai dengan 6 (enam) mil laut. Jalur Penangkapan Ikan II sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b meliputi perairan di luar Jalur Penangkapan Ikan I sampai dengan 12 (dua belas) mil laut ke arah laut. Jalur Penangkapan Ikan III, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi perairan di luar Jalur Penangkapan Ikan II sampai dengan batas terluar Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).

Menurut jenis alat tangkapnya, Jalur penangkapan Ikan I terdiri dari perairan pantai yang diukur dari permukaan air laut pada surut yang terendah sampai dengan 3 (tiga) mil laut sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) huruf a, hanya diperbolehkan bagi : (a) Alat Penangkap Ikan yang menetap; (b) Alat Penangkap Ikan tidak menetap yang tidak dimodifikasi; dan/atau, (c) Kapal Perikanan tanpa motor dengan ukuran panjang keseluruhan tidak lebih dari 10 m.

Tabel 5.1 Jumlah Armada Perikanan Laut Menurut Ukuran

No	KABUPATEN/KOTA	JENIS DAN UKURAN PERAHU/KAPAL									JUMLAH TOTAL	
		PERAHU TANPA MOTOR			MOTOR TEMPEL	KAPAL MOTOR						
		JUKUNG	PERAHU PAPAN			0-5	6-10	11-20	21-30	>30		
			KECIL	SEDANG	BESAR							
1	KAB. GRESIK	-	397				3.961	92	28		-	4.478
2	KOTA SURABAYA	-		14	2.006	2.006					-	4.026
3	KAB. BANGKALAN	-			2.704	2.704	158	23			-	5.589
4	KAB. SAMPANG	-		223		2.933	600	85			-	3.841
5	KAB. PAMEKASAN	-				1.966					89	2.055
6	KAB. SUMENEP	276				1.109	2.769	1.342	958	597	238	7.289
7	KAB. SIDOARJO	-				587					-	587
8	KAB. PASURUAN	24	391	1.152		2.981					-	4.548
9	KOTA PASURUAN	15		120	79	359	6	35	20	25	-	659
10	KAB. PROBOLINGGO		178			1.719	1	34	42	106	-	2.080
11	KOTA PROBOLONGGI	36	6	41		27		72	67	37	-	286
12	KAB. SITUBONDO			763		1.405					-	2.168
13	KAB. BANYUWANGI	298	889	1.350	761	4.080	382	679	202	174	-	8.815
	<b>TOTAL</b>	<b>649</b>	<b>1.861</b>	<b>3.663</b>	<b>5.550</b>	<b>21.876</b>	<b>7.877</b>	<b>2.362</b>	<b>1.317</b>	<b>939</b>	<b>327</b>	<b>46.421</b>

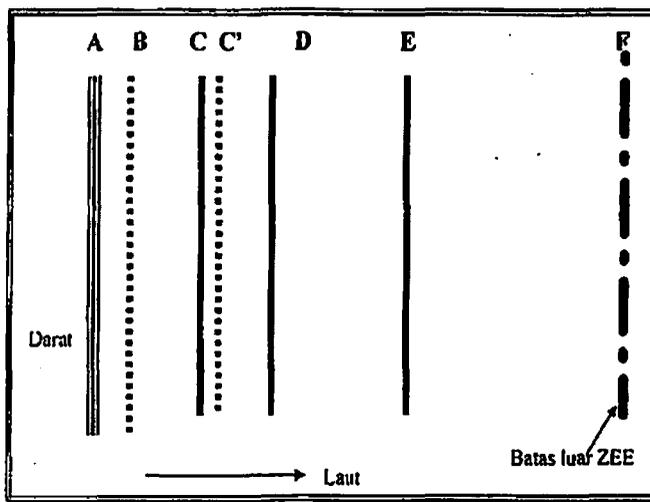
Tabel 5.2 Jumlah Nelayan di Kawasan Selat Madura

NO	KABUPATEN/KOTA	NELAYAN LAUT				NELAYAN ANDON	NELAYAN PERAIRAN UMUM	TOTAL
		TETAP	SAMBILAN	KADANG-KADANG	SUB JUMLAH			
1	KAB. GRESIK	3.892	5.312	-	9.204	467	615	10.286
2	KOTA SURABAYA	1.190	929	232	2.351	461	50	2.862
3	KAB. BANGKALAN	5.193	-	-	5.193	-	119	5.312
4	KAB. SAMPANG	10.772	9.777	223	20.772	248	54	21.074
5	KAB. PAMEKASAN	14.608	-	-	14.608	-	92	14.700
6	KAB. SUMENEP	28.574	7.843	3.598	40.015	1.155	84	41.254
7	KAB. SIDOARJO	1.815	-	-	1.815	292	380	2.487
8	KAB. PASURUAN	10.030	645	305	10.980	50	65	11.095
9	KOTA PASURUAN	1.215	125	53	1.393	60	-	1.453
10	KAB. PROBOLINGGO	10.113	127	968	11.208	330	221	11.759
11	KOTA PROBOLONGGI	1.850	185	52	2.087	277	50	2.414
12	KAB. SITUBONDO	2.800	10.182	1.246	14.228	-	-	14.228
13	KAB. BANYUWANGI	19.542	1.908	-	21.450	65	2.150	23.665
	<b>TOTAL</b>	<b>111.594</b>	<b>37.033</b>	<b>6.677</b>	<b>155.304</b>	<b>3.405</b>	<b>3.880</b>	<b>162.589</b>

Perairan pantai di luar 3 (tiga) mil laut sampai dengan 6 (enam) mil laut, hanya dibolehkan bagi : (a) Alat Penangkap Ikan tidak menetap yang dimodifikasi, (b) Kapal perikanan dengan spesifikasi: (1) tanpa motor dan atau bermotor-tempel dengan ukuran panjang keseluruhan tidak lebih dari 10 m; (2) bermotor tempel dan bermotor-dalam dengan ukuran panjang keseluruhan maksimal 12 m atau berukuran maksimal 5 GT dan atau, (3)

pukat cincin (*purse seine*) berukuran panjang maksimal 150 m, (4) jaring insang hanyut (*drift gill net*) ukuran panjang maksimal 1000 m.

Jenis alat tangkap Jalur II terdiri dari



Keterangan gambar:

- A : Garis pantai
- A-B : Jarak air laut surut terendah.
- B-D : Jalur penangkapan I sepanjang enam mil laut.
- B-C : Jalur penangkapan Ia sepanjang tiga mil laut.
- C-D : Jalur penangkapan Ib sepanjang tiga mil laut.
- D-E : Jalur penangkapan II sepanjang enam mil laut.
- E-F : Jalur penangkapan III, di luar jalur II sampai dengan batas luar ZEE.
- B-E : Wilayah pengelolaan provinsi sepanjang 12 mil laut.
- B-C' : Wilayah pengelolaan kabupaten/kota, sepertiga wilayah provinsi

Gambar 6.2. Skema Jalur Penangkapan Ikan berdasarkan SK Mentan 293/99

### 5.3. Bentuk dan Pola Konflik Nelayan di Kawasan Selat Madura

Berdasarkan data-data kasus konflik nelayan yang terdapat di Selat Madura baik yang bersumber dari Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi

Jawa Timur, dari catatan Pos Keamanan Laut Terpadu (KAMLADU), maupun laporan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten atau Kota di pesisir Selat Madura, maka pada bagian ini akan digambarkan bentuk-bentuk konflik dan pola konfliknya.

Bentuk konflik nelayan di Selat Madura berdasarkan pada pelakunya, maka konflik dapat diklasifikasi ke dalam : (1). konflik individu dengan individu, (2) konflik antara individu dengan kelompok nelayan, (3) konflik antar kelompok nelayan, dan (4) konflik antara kelompok nelayan dengan lembaga.

*Konflik antara individu dengan individu lain.* Konflik terjadi manakala individu nelayan melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan yang sudah ditetapkan baik oleh pemerintah maupun ketentuan lokal. Penggunaan jaring *Trawl*, penggunaan potasium, penggunaan bahan peledak sering menjadi penyebab bentuk konflik ini. Apabila kasusnya diproses verbal, maka penanganannya tidak sampai pada pengadilan. .

*Konflik antara individu dengan kelompok nelayan.* Terjadi ketika nelayan memasuki wilayah lain. Meskipun laut sifatnya *open access* dan dalam memanfaatkan sumber daya laut juga diakusi sebagai milik bersama, masih saja ada nelayan yang mengakui bahwa daerah tertentu adalah wilayah tangkapnya (*fishing ground*). Kasus konflik nelayan di Masalembo, dan di Kwayar Bangkalan menggambarkan bahwa konflik yang terjadi disebabkan adanya keyakinan bahwa si pendatang melakukan pelanggaran wilayah tangkapan.

*Konflik antar kelompok nelayan.* Terjadi ketika konflik sudah melibatkan kelompok nelayan. Kasus konflik antara nelayan Pasuruan dengan Nelayan Desa Betah di Sampang menggambarkan bahwa dalam kasus konflik ini antara kedua kelompok sudah mencapai pada puncaknya. Dalam beberapa bulan, mereka saling menyandera dan membakar perahu dan bahkan ada yang korban meninggal.

*Konflik antara kelompok nelayan dengan institusi.* Kasus pengerukan pasir di Selat Madura oleh PT Gora Gahana di Kelurahan Nambangan Kecamatan Kenjeran merupakan bentuk konflik ini. Dalam kasus ini melalui Forum Masyarakat Pesisir Suramadu, mereka melakukan protes kepada perusahaan dan lembaga yang terkait.

Selain bentuk konflik yang didasarkan pada pihak-pihak yang berkonflik, kategorisasi konflik juga bisa dilakukan berdasarkan pada sumber konflik. Berdasarkan pada sumbernya, konflik nelayan di Selat Madura dapat diklasifikasi ditinjau dari sumbernya dapat dikategorikan kedalam 3 macam bentuk konflik, yaitu: (1) konflik ekonomi, (2) konflik kewilayahan (3) konflik primordial.

*Konflik ekonomi.* Konflik ekonomi terjadi karena terbatasnya sumberdaya alam. Laut sebagai open acces memungkinkan penambahan jumlah nelayan yang mencari ikan di suatu wilayah tertentu, namun karena sumber daya ikan relatif tetap atau bahkan menurun, maka penghasilan nelayan menjadi menurun. Dengan penghasilan yang menurun, maka nelayan ini melakukan pelanggaran baik menggunakan alat tangkap yang

dilarang oleh pemerintah, maupun pelanggaran jalur tangkapan ikan. Perlu diketahui bahwa jalur tangkapan telah ditentukan oleh pemerintah melalui Surat Keputusan Menteri.

*Konflik kewilayahan.* Potensi konflik kewilayahan terjadi karena ada kesan dikalangan nelayan, bahwa sekian ratus meter dari pesisirnya adalah wilayah kabupaten atau daerahnya. Pandangan demikian ini tidak semuanya benar. Apalagi para neayan ini tidak mendapatkan informasi yang lengkap tentang otonomi daerah. Nelayan yang dipandang memasuki wilayah tangkapannya maka mereka ini dipandang melakukan pelanggaran. Konflik ini menjadi anekdot, artinya para nelayan yang berkonflik ini sebenarnya tidak mengetahui titik koordinat ketika mereka melaut, karena umumnya nelayan ini tidak membawa alat / teknologi yang bisa menentukan posisinya saat dilaut, misalnya penggunaan GPS.

*Konflik Primordial.* Konflik primordial terjadi karena para nelayan merasakan bahwa mereka telah memiliki daerah tangkapan di laut tersebut secara turun-temurun atau karena mereka berasal dari daerah tersebut.

Bentuk konflik berikutnya adalah tipologi konflik nelayan berdasarkan pada muncul tidaknya konflik secara nyata atau laten. Oleh karena itu kategorisasinya adalah konflik nelayan yang manifes dan konflik nelayan yang laten/potensial.

*Konflik nelayan manifes.* Konflik nelayan yang manifes terjadi apabila antar nelayan melakukan tindakan kekerasan, penyanderaan,

pengrusakan dan perlawanan terhadap nelayan lain atau dengan pihak yang dianggap lawan. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 12 Juli 1995 di perairan Karangjumuang, Bangkalan Utara. Pada konflik tersebut nelayan lokal berkonfrontasi dengan nelayan Lamongan, akibatnya terjadilah pembakaran perahu-perahu nelayan Lamongan oleh nelayan Bangkalan, karena nelayan Bangkalan menganggap wilayah perairan tersebut adalah milik mereka sejak turun temurun dan melarang nelayan Lamongan untuk menangkap ikan di perairan mereka. Kasus serupa terjadi pula di perairan Sidoarjo, dimana bentrok antanelayan dari Pulau Mandangin Sampang dengan Nelayan Kisik, Pasuruan yang disebabkan perebutan lokasi penangkapan udang.

*Konflik nelayan laten/potensial.* Konflik nelayan laten / potensial adalah konflik yang tidak sampai muncul ke permukaan dan dapat dilihat, namun keberadaannya dapat dirasakan dalam interaksi sesama nelayan. Konflik nelayan yang potensial ini muncul diantara nelayan (pekerja di kapal), pemilik kapal, nahkoda dan juga para nelayan andon yang didatangkan oleh pemilik modal lokal untuk melakukan eksplorasi di daerah tersebut. Para nelayan Andon ini ada yang dari kabupaten lain di Jawa Timur dan ada pula nelayan yang datang dari Jawa Tengah, misalnya Jepara, Rembang, Juwana.

#### **5.4. Sumber Penyebab Konflik Nelayan di Selat Madura**

Sumber-sumber penyebab konflik nelayan yang terjadi Selat

Madura cukup bervariasi. Penyebabnya adalah tindakan pelanggaran memicu munculnya konflik baik horisontal sesama nelayan, maupun konflik vertikal (dengan penguasa/pemilik modal). Berikut ini rangkuman dari penyebab konflik dari sejumlah kasus konflik nelayan yang terjadi sejak 2005 hingga 2012, yaitu:

1. Pelanggaran wilayah tangkap karena persoalan wilayah perairan. `
 

Kasus ini terkesan bahwa pemahaman akan otonomi daerah masih kurang tepat. Interpretasi UU No. 22 Tahun 1999 masih kurang jelas. Banyak pihak yang mempertanyakan tentang Wilayah otonomi penangkapan ikan, sementara peraturan pelaksanaan dari UU tersebut belum ada. Sehingga penguasaan wilayah perairan ditafsirkan sebagai bentuk pengkavlingan laut. Sedang pada tingkat nelayan telah menimbulkan konflik horisontal yang amat tajam
2. Pelanggaran zona tangkapan yang tidak sesuai ketentuan pemerintah.
 

Zona tangkapan ini berhubungan dengan jenis / kapasitas ukuran kapal dan alat tangkap yang digunakannya. Pemerintah melalui SK Menteri Pertanian Tanggal 5 April 1999 Nomor 392/Kpts./TK.120/4/99 tentang Jalur-jalur penangkapan Ikan sebenarnya sudah dengan terinsi memberikan ketentuan tersebut. Namun karena berbagai alasan yang muncul, maka pelanggaran itu tetap saja terjadi dan dapat akhirnya dapat memicu munculnya konflik antar nelayan.
3. Kesenjangan penggunaan alat tangkap yang sudah ditetapkan pemerintah. Misalnya pelarangan penggunaan jaring *trawl* oleh para

nelayan. Pelarangan penggunaan jaring trawl dan alat lainnya telah diatur oleh pemerintah. Berikut ini tabel jenis alat tangkap ikan yang jenis ketentuan hukumnya. Larangan Penggunaan Jaring Trawl sudah diatur Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Keputusan Presiden RI No.39 Tahun 1980 tentang Penghapusan Jaring Trawl: kegiatan penangkapan ikan yang menggunakan jaring trawl dihapus secara bertahap dan pada pasal 2 dinyatakan bahwa berdasarkan Pasal 2 Keputusan Presiden RI No.39 Tahun 1980, terhitung mulai tanggal 1 Juli 1980 sampai dengan tanggal 1 Juli 1981 kapal perikanan yang menggunakan jaring trawl dikurangi jumlahnya, sehingga seluruhnya tinggal menjadi 1000 (seribu) buah; dan berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden RI Nomor 39 Tahun 1980; bahwa Presiden RI mengintruksikan terhitung mulai tanggal 1 Januari 1983 di seluruh Indonesia tidak lagi terdapat kapal perikanan yang menggunakan jaring trawl.

Tabel 5.3. Ketentuan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan.

No	Jenis Alat PI	Jalur Penangkapan Terlarang	Spesifikasi Ukuran Alat PI Yg Direkomendasikan	Landasan Hukum
1.	Pukat Ikan S.Malaka  Pukat Ikan di luar S. Malaka	Per. Teritorial  Per. Teritorial	<input type="checkbox"/> Mesh size cod end $\geq 50$ mm. <input type="checkbox"/> Pada ground rope tidak menggunakan bobin dan rantai pengejut.. <input type="checkbox"/> Tidak dioperasikan dengan 2 kapal	Kep Mentan No.770/Kpts/IK.120/10/96; Kep. Ditjen. No. IK.340/D3. 2304/96K
2.	Pukat Udang	Isobath <10>	<input type="checkbox"/> Mesh size cod end $\geq 30$ mm <input type="checkbox"/> Pakai TED/API jarak jeruji $\geq 10$	Kepres 85 /82

			cm <input type="checkbox"/> Tidak dioperasikan dengan 2 kapal	
3.	Purse Seine PK/PB	Jalur I a (<3>  Jalur I  ◇  T.Tomini, L.Maluku, L.Seram, L.Banda, L.Flores, L.Sawu	Panjang jaring ◇  PS Non Group Panjang ◇  PS 2 Kapal Non Group Panjang ◇  PS Group & >350 GT ◇  Purse Seine PB  Ukuran Mesh Size PS PK > 1 inchi  Ukuran Mesh Size PS PB > 3 inchi	Kep. Mentan 392/99
4.	Gill Net	Jalur I a, Jalur I  Jalur I & II	Panjang ≤ 1000 m  Panjang ≤ 2500 m  Panjang ≥ 2500 m	Kep. Mentan 392/99
5.	Tuna Long Line	Jalur I  Jalur I dan II	Jumlah mata pancing ≤ 1.200  Jumlah mata pancing ≥ 1.200	Kep. Mentan 392/99
6.	Pukat Hela Kaltim Bagian Utara	Perairan ≤ 1 mil  Perairan ≤ 4 mil	≤ 5 GT  > 5 GT ≤ 30 GT	Permen KP. No. 06/2008
7.	Gill Net ZEEI	Perairan teritorial (≤ 12 mil)	Gill net hanyut (mesh size ≥ 10 cm, panjang ≤ 10000 m dan dalam ≤ 30 m)  Gill net tetap (mesh size ≥ 20 cm, panjang ≤ 10000 m dan dalam ≤ 30 m)	Permen KP. No. 08/2008

Sumber: <http://mukhtar-api.blogspot.com/2008/09/ketentuan-penggunaan-alat-penangkapan.html>

4. Pengrusakan rumpon atau jaring nelayan. Pengrusakan adalah tindakan yang memang sudah melanggar. Namun dalam pasal pengrusakan ini seringkali penyebabnya adalah adanya persepsi nelayan bahwa laut adalah milik semua orang, sehingga siapapun berhak atas pengelolaan

laut dan pemanfaatannya (*open acces*). Dalam kasus ini seringkali juga, nelayan tidak mengetahui pemiliknya.

5. Konflik lainnya juga muncul dari kecemburuan sosial terutama ketika nelayan pendatang lebih mampu dalam memiliki peluang mengelola sumber daya perikanan daripada nelayan lokal.
6. Nelayan pendatang (*andon*) memiliki alat tangkap yang lebih modern dibandingkan nelayan di wilayah setempat.

Sementara itu, konflik nelayan yang bersifat potensial agak susah dideteksi langsung, namun bisa dirasakan ketika ada hubungan yang erat di saat peneliti melakukan interaksi dengan mereka.

Adapun penyebab konflik nelayan yang potensial disebabkan oleh beberapa hal:

- a. Nelayan tidak mendapatkan penghasilan yang diharapkan dari *juragannya*,
- b. Juragan tidak mendapatkan ikan yang sesuai harapan, padahal sarana kapal telah menghabiskan banyak solar
- c. Sikap dan prasangka nelayan terhadap nelayan lainnya

Faktor pemicu konflik nelayan di perairan Selat Madura bisa dipisahkan karena penggunaan alat tangkap Mini-Trawl (*Tongep*), pelanggaran terhadap jalur penangkapan ikan, penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan (*destruktif*), seperti peledak dan potasium; dan perbedaan metode operasi alat tangkap. Konflik karena pelanggaran terhadap jalur penangkapan terjadi pada hampir seluruh daerah, walaupun

tidak ada batas fisik yang jelas tentang jalur penangkapan ikan.

### **5.5.Pola Penyelesaian Konflik Nelayan**

Pola penyelesaian konflik selama ini dilakukan dengan cara yang arif, artinya tidak semua persoalan nelayan diselesaikan melalui jalur hukum. Hal ini didukung dengan pernyataan Polairud dan Lantamal dalam suatu acara sosialisasi yang diselenggarakan oleh Dinas Perikanan dan kelautan. Pada saat pertemuan ini, ada pernyataan yang menyatakan bahwa semua konflik nelayan yang ada di Jawa Timur selama ini diselesaikan bukan dengan cara hukum, melainkan dengan mediasi Kamladu (Keamanan Laut Terpadu) dan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HSNI) di wilayah kabupaten tersebut ataupun melaku ketua-ketua rukun nelayan. Perlu dijelaskan di sini bahwa rukun nelayan ini selalu dibentuk di wilayah komunitas nelayan.

Oleh karena itu, dari 24 kasus yang terjadi selama ini sejak tahun 2005 hingga 2012 (Data Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Jatim, 2012), hampir seluruh kasus pelanggaran dihentikan (P21). Para pelanggar dikembalikan kepada ketua rukun nelayannya untuk dibina.

Salah satu contoh pernyataan nelayan yang pernah melanggar dan kemudian kasusnya dihentikan membuat pernyataan seperti berikut:

1. Saya tidak akan mengulangi menangkap ikan dengan menggunakan jaring Mini trawl dan saya bersedia untuk mendaratkan/menjual ikan hasil tangkapan ikan di PPI tertentu.

2. Apabila sewaktu-waktu saya dibutuhkan guna proses hukum lebih lanjut saya bersedia untuk menghadap beserta barang bukti yang saya pergunakan.
3. Apabila dikemudian hari tertangkap kembali oleh Petugas Kamladu saya bersedia untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Kalau kasus di atas adalah penyelesaian dalam pelanggaran, berikut ini adalah penyelesaian konfliknya. Dalam kasus konflik antara nelayan Kwanyar dengan nelayan Pasuruan, maka penyelesaian konfliknya menggunakan cara mediasi. Dalam mediasi ini, tokoh masyarakat Kwanyar diwakili oleh alumni santri dari Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan. Sementara itu dari pihak Pasuruan juga diwakili oleh alumni santri dari Pondok Pesantren yang sama. Karena para mediator ini berasal dari pondok yang sama, maka kasus konflik yang berbulan-bulan tersebut akhirnya bisa diselesaikan dengan cara yang arif .

Bila ditinjau dari teori resolusi konflik, maka pola kompromi antara kedua kelompok nelayan yang berseteru bisa diakhiri. Proses kompromi menggunakan mediator dan posisi mediator ini adalah sejajar, sehingga satu tidak diletakkan, dan yang lain tidak direndahkan. Pemanfaatan tokoh dari pondok pesantren tampaknya menjadi salah satu bentuk kearifan lokal dalam penyelesaian konflik antara nelayan yang terjadi di Selat Madura ini.

## 5.6. Kearifan Lokal sebagai Modal Sosial Penyelesaian Konflik Nelayan

Kearifan lokal adalah sumber norma, bagian dari unsur yang secara informal menjadikan anggota tatanan dapat mengkoordinasikan diri mewujudkan tujuan bersama, dan karena itu ia adalah bagian dari modal sosial (Fukuyama, 2002; Field, 2010). Ketika tujuan bersama itu tersepakati pada tingkat lokal, maka ia menguatkan kohesi sosial pada tingkat lokal, bila tujuan bersama itu bersesuaian sama lain antar lintas lokal, maka dapat menguatkan kohesi sosial lintas lokal, bila tujuan bersama itu bersesuaian antara tingkat lokal dengan supra lokal, maka dapat menguatkan kohesi sosial vertikal (Colletta dan Cullen, 2000; Fukuyama, 2002).

Berdasarkan temuan di lapangan, bentuk-bentuk kearifan lokal yang dapat di temukan di lapangan meliputi (1) organisasi / kelompok sosial, (2) bentuk-bentuk budaya lokal masyarakat, (3) nilai komitmen antara nelayan.

Kearifan lokal yang berbentuk organisasi / kelompok sosial ini antara lain munculnya kelompok kerukunan nelayan yang secara formal/informal dibentuk masyarakat nelayan agar permasalahan lokal yang terjadi antar nelayan dapat diselesaikan bersama. Organisasi ini umumnya muncul karena kesepakatan. Organisasi ini bisa bersifat lokal kelompok, seperti tingkat desa nelayan, maupun tingkat kecamatan, dan seterusnya. Rukun nelayan adalah salah satu bentuk organisasi lokal yang

sangat besar perannya dalam menyelesaikan konflik.

Disamping rukun nelayan, juga ada organisasi yang disebut sebagai Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI). Sebagai lembaga non formal, keberadaannya sangat dibutuhkan anggota dan juga pemerintah untuk membantu menyelesaikan persoalan nelayan dan juga untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya.

Selain itu, bentuk kearifan lokal yang lain adalah budaya lokal yang diciptakan oleh masyarakat setempat dalam bentuk prosesi, upacara, aktivitas yang dilakukan rutin di masyarakat. Misalnya saja upacara petik laut, upacara larung sesaji, dan sebagainya. Dari kegiatan ini, masyarakat nelayan memiliki keyakinan bahwa apa yang dilakukan ini agar mendapatkan berkah dari yang Maha Kuasa.

Bentuk kearifan lokal yang lain yaitu adanya nilai komitmen yang dipegang teguh oleh para nelayan. yaitu bahwa di masyarakat tersebut memiliki kesepakatan untuk tidak melanjutkan konflik lebih jauh sampai ranah pengadilan. Pada nelayan Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Madura, dan Pasuruan menyepakati bahwa nelayan dari luar daerah boleh menangkap ikan di wilayah Selat Madura asalkan dengan alat tangkap yang sama yang tidak merusak lingkungan. Kesepakatan ini melalui proses musyawarah yang dimediasi oleh pihak non-nelayan dan tokoh-tokoh nelayan setempat. Hasil musyawarah berdasarkan aturan local nelayan setempat dan disetujui oleh nelayan-nelayan yang menangkap ikan di Selat Madura.

## **BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN**

### **6.1 Kesimpulan**

Dari serangkaian uraian di atas, maka dapatlah disimpulkan:

1. Bentuk konflik nelayan. Berdasarkan pada pelakunya : ada konflik individu dengan individu, individu dengan kelompok nelayan, kelompok nelayan dengan kelompok nelayan, dan individu / kelompok nelayan dengan lembaga Berdasarkan pada sumber konfliknya, maka ada karena faktor ekonomi, faktor kewilayahan, dan faktor primordial. Berdasarkan kemunculannya, ada konflik manifes dan konflik laten/potensial.
2. Penyebab Konflik Nelayan yaitu 1) pelanggaran wilayah tangkap, 2. pelanggaran zona tangkapan pengrusakan rumpon / jaring, Kesenjangan penggunaan alat tangkap, pengurusan rumpon atau jaring nelayan, kecemburuan sosial, menjadi nelayan andon.
3. Penyelesaian konflik: Penyelesaian konflik dilakukan dengan dialog yang arif . proses mediasi. Dalam mediasi peran ketua rukun nelayan dan HNSI sangat penting dalam membantu Pemerintah untuk menyelesaikan konflik ini.
4. Kearifan lokal untuk menyelesaikan masalah konflik nelayan antara lain, yaitu: ada lembaga rukun nelayan dan HNSI. Peran tokoh dan pimpinan agama juga sangat membantu dalam memediasi dan sekaligus menyelesaikan konflik.

## 6.2 Saran-saran

1. Konflik nelayan dapat dicegah apabila sesama nelayan memahami betul tentang aturan perundangan yang diberlakukan di wilayah Indonesia. Masalahnya tidak semua nelayan memahami dan mematuhi ketentuan itu. Oleh karena dibutuhkanlah sosialisasi tentang peraturan.
2. Biasanya, konflik yang manifes muncul setelah dialati dengan ketegangan sesama nelayan. Sebelum terjadi konflik manifest, para ketua rukun nelayan hendaknya bisa mengantisipasi dan bisa meredam konflik.
3. Di setiap lingkungan nelayan terdapat kearifan lokal. Penggalan nilai-nilai kearifan lokal perlu lebih digalakkan, dan disosialisasikan dengan baik kepada warganya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, Tribun Jatim (Selasa, 12 Juni 2012 10:51 WIB), Nelayan Sering Bentrok, Dinas Perikanan se-Jatim Dikumpulkan <http://jatim.tribunnews.com/2012/06/12/nelayan-sering-bentrok-dinas-perikanan-se-jatim-dikumpulkan>
- Baron, R.A dan Byrne, D (1997) *Social Psychology*. Boston, MA: Pearson/Allyn and Bacon.
- Berry, John W; Poortinga, Ype H; Segall, Marshall H; Dasen, Pierre R (2002), *Cross-cultural psychology: Research and applications* (2nd ed.), Cambridge: Cambridge University Press, ISBN 0-521-64617-0,
- De Dreu, C KW, dan Gelfand, M. J. (2007) *The Psychology of Conflict and Conflict Management in Organizations*. New York: Lawrence Erlbaum Associate.
- Fukuyama, F. (1995) *Trust: The Social Virtues of The Creation of Prosperity*, New York: Free Press Paperbacks.
- Hermawanti, M dan Rinandari, (2005) *Pemberdayaan Masyarakat Adat*, IRE.
- Kondalkar, VG. 2007. *Organizational Behavior*. New Delhi: New Age International Limited Publisher.
- Kusnadi (2003). *Akar Kemiskinan Nelayan*: Yogyakarta: LkiS
- Kusnadi dan Rahim, A ( 2007) *Jaminan Sosial Nelayan* . Yogyakarta: LkiS
- Kusnadi, 2006, Konflik sosial nelayan : kemiskinan dan perebutan sumber daya perikanan, Yogyakarta : LKiS
- Lin, N (2001) *Social Capital : A Theory of Social Structure and Action*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Macneill J, Winsemius P, Yakushiji T. 1991. *Beyond Interdependence: The Meshing of the World's Economy and the Earth's Ecology*, New York:

Oxford University Press.

Mahluli, M, Kompasiana, 8/6/2010. <http://sosbud.kompasiana.com/2010/06/08/pendekatan-berbasis-akar-budaya-dalam-upaya-peningkatan-kesejahteraan-masyarakat-nelayan-di-wilayah-pesisir-madura/>

Myers, D. G (2002) *Social Psychology*, Michigan, USA: Hope College.

Ostrom E. 1990. *Governing the Commons, The Evolution of Institutions for Collective Action* Cambridge: Cambridge University Press

Pondy, L.R., quarterly Sept.1969, *Organization Conflict, Concepts and Models, administrative science*, pp 296-320."

Ramadhansyah, Ridha, (2008) *Peran Pemerintah Bangkalan Dalam Penyelesaian Konflik Antara Nelayan Bangkalan Dengan Nelayan Pasuruan (Studi Di Desa Batah Barat Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan )* Government Science

Robbins, S. R. 2001 . *Organizational Behaviour*, Ninth Edition, New Delhi: Prentice Hall

Tiezzi, E., Marchettini, T. & Rossini, M. TT. *Extending the Environmental Wisdom beyond the Local Scenario: Ecodynamic Analysis and the Learning Community*. <http://library.witpress.com/pages/paperinfo.asp>.

Yaqin, A., M. (2005). *Pendidikan Multikultural. Cross-Cultural Understanding untuk Demokrasi dan Keadilan*. Yogyakarta: Pilar Media



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
 JALAN PUTAT INDAH NO.1 TELP. (031) - 5677935, 5681297, 5675493  
 SURABAYA - (60189)

Surabaya, 25 Juli 2012

Kepada

- Yth. 1. Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Prov. Jatim;  
 2. Walikota Surabaya di Surabaya;  
 3. Walikota Probolinggo di Probolinggo;  
 4. Bupati Probolinggo di Probolinggo;  
 5. Bupati Banyuwangi di Banyuwangi;  
 6. Bupati Situbondo di Situbondo;  
 7. Bupati Pasuruan di Pasuruan;  
 8. Bupati Sidoarjo di Sidoarjo;  
 9. Bupati Bangkalan di Bangkalan;  
 10. Bupati Gresik di Gresik.  
Cc. Kepala Badan/Kantor Kesbangpol dan Linmas

: 070/ 7738 / 203 / 2012  
 : Biasa  
 :  
 : Penelitian/Survey/Research

Menunjuk surat Dekan Fakultas Psikologi Universitas Airlangga tanggal 20 Juli 2012 Nomor : 1289/H3.1.9/PPd/2012 perihal Surat Ijin Penelitian, bersama ini diberitahukan bahwa :

Nama : Prof. Dr. Suryanto, M.Si  
 Alamat : Pondok Buana Kav. F-4 Bluru Kidul Sidoarjo  
 Pekerjaan : Dosen  
 Kebangsaan : Indonesia

Bermaksud mengadakan penelitian/survey/research :

Judul : "MODEL PENYELESAIAN KONFLIK NELAYAN DI KAWASAN SELAT MADURA BERBASIS PADA KEARIFAN LOKAL SEBAGAI MODAL SOSIAL  
 Pembimbing : Prof. Dr. Suryanto, M.Si  
 Peserta : Moh. Bagus Gozhali Aniputro, S.Psi. M.Psi  
 Waktu : 6 (enam) bulan  
 Lokasi : Kota Surabaya, Probolinggo dan Kab. Probolinggo, Banyuwangi, Situbondo, Pasuruan, Sidoarjo, Bangkalan, Gresik

Sehubungan dengan hal tersebut, diharapkan dukungan dan kerjasama pihak terkait untuk memberikan bantuan yang diperlukan. Adapun kepada peneliti agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Berkewajiban menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat;
2. Pelaksanaan penelitian/survey/research agar tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan keamanan dan ketertiban di daerah setempat;
3. Melaporkan hasil penelitian dan sejenisnya kepada Bakesbangpol Provinsi Jawa Timur dalam kesempatan pertama.

Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

PROVINSI JAWA TIMUR  
 Kepala Bidang Budaya Politik  
 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
**EDDY SUPRIYANTO, S.STP., M.PSDM.**  
 Pembina

NIP-19750319 199511 1 002  
 Model Penyelesaian Konflik ....

Prof. Dr. Suryanto, M.Si

san :  
 Dekan Fakultas Psikologi Universitas Airlangga di Surabaya, AN PENELITIAN Yang bersangkutan.